



**DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI**

2019



LAKIN

LAPORAN KINERJA

KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik selama tahun 2019.

Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2019. Pengukuran kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur dari pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019.

Berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa, KPPBC TMP Tanjung Emas secara umum dapat mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 yang dibebankan dengan hasil yang baik. Nilai Kinerja Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2019 adalah 112,16%, atau meningkat 0,96% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 111,20%.

Pencapaian luar biasa tersebut merupakan hasil jerih payah dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas. Oleh karena itu selaku pimpinan KPPBC TMP Tanjung Emas saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas atas kinerja yang ditunjukkan selama tahun 2019. Semoga kerja keras dan kinerja yang telah ditunjukkan pada tahun 2019 agar dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan Bea Cukai yang makin baik.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban KPPBC TMP Tanjung Emas kepada pimpinan dan publik dan semoga dapat mendorong kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas agar mendapat hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semarang, Januari 2020

Kepala Kantor



Anton Martin



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2019 menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2019 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019, sesuai Kontrak Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Nomor 6/BC.21/2019 tanggal 28 Januari 2019. Laporan Kinerja merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas menuju terwujudnya *good goverment*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 dan terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi *level* Kementerian Keuangan (*level* Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level Eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

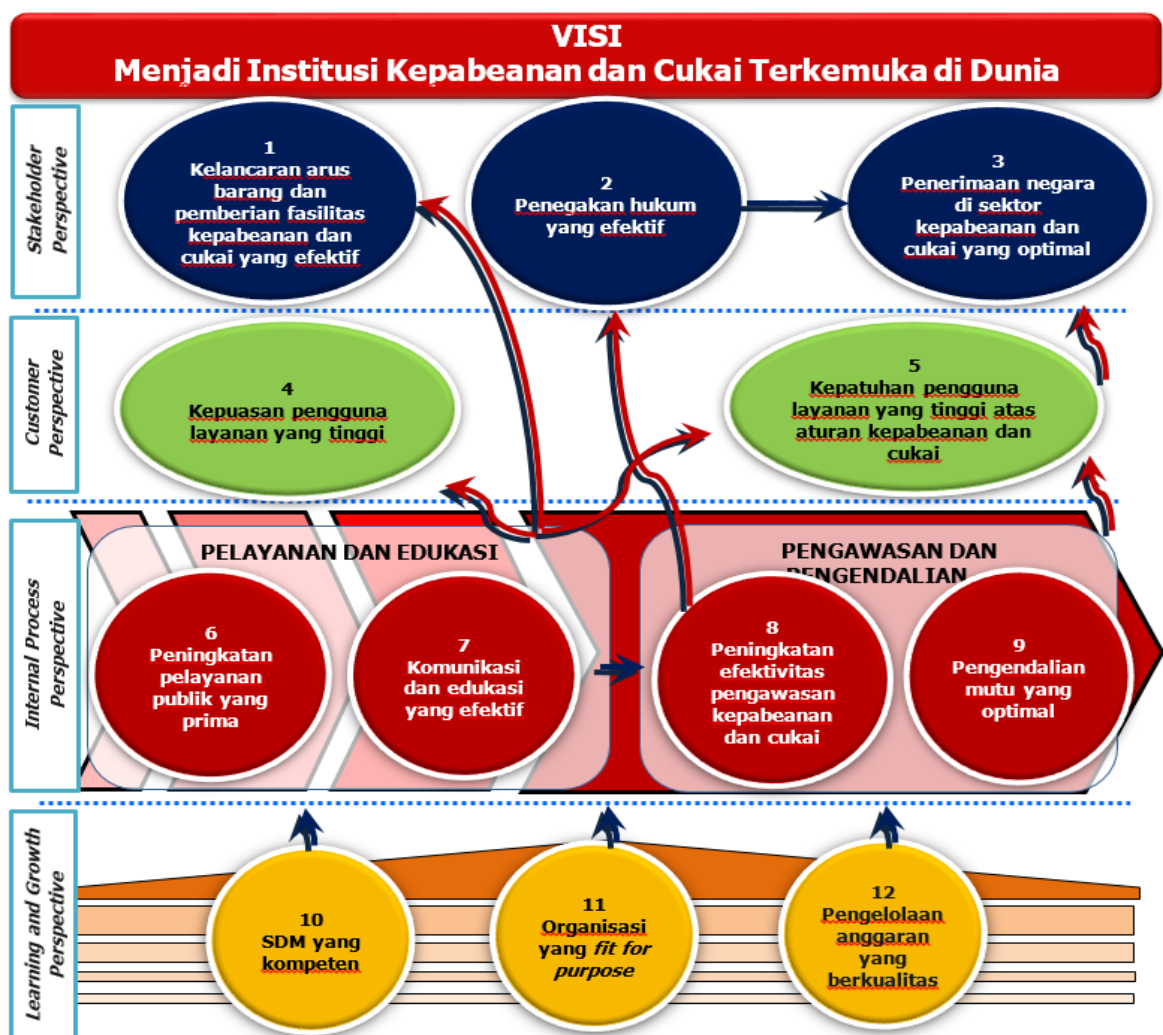
Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 diterjemahkan ke dalam 12 Sasaran Strategis yang terdiri dari 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2019, secara keseluruhan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas sudah baik dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 112,16%. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (27,72%), *Customers Perspective* (16,61%), *Internal Process Perspective* (34,65%), dan *Learning and Growth Perspective* (33,17%). Dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan kepada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat dicapai dengan hasil yang baik dengan realisasi 15 (lima belas) IKU melampaui target yang telah

ditetapkan (hijau) dan 1 (satu) IKU tidak ada capaian karena tidak ada kegiatan penyidikan.

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. KPPBC TMP Tanjung Emas telah merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 untuk semua jenis belanja sebesar 96,05%, yaitu Rp22.887.798.219,00 dari total pagu sebesar Rp23.830.153.000,00. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dengan sekedar meyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian *Output*, efisiensi, konsistensi, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan surat perintah membayar (SPM), retur SP2D, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pagu minus dan dispensasi.

Berikut ini adalah Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2019:

Gambar A.1
PETA STRATEGI KPPBC TMP TANJUNG EMAS 2019



Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan IKU beserta target yang dituangkan dalam Rencana Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel A.1
SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
Stakeholder Perspective				
1	Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,1 hari
2	Penegakan hukum yang efektif	2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	70%
3	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
Customer Perspective				
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,03 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%
		5b-CP	Persentase kepatuhan importir	80%
Internal Process Perspective				
6	Peningkatan pelayanan publik yang prima	6a-CP	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai	8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%
		9b-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%
		9c-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%
Learning and Growth Perspective				
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%
11	Organisasi yang fit for purpose	11a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

LAPORAN KINERJA 2019

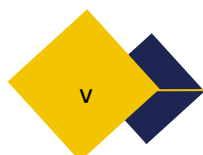
Berdasarkan target di atas, capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 dapat tercapai dengan baik. Dari 16 IKU, terdapat 15 IKU berstatus "hijau" (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan) dan 1 IKU berstatus "Abu-abu" (tidak ada capaian). IKU yang capainya "Abu-abu" yaitu IKU "Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)". Hal ini karena tidak ada kegiatan penyidikan di KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2019. Rincian status capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel A.2
Pencapaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Keterangan
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,1 hari *)	0,71 hari	Tercapai
2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	70%	N/A	Tidak ada capaian
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100% **)	101,79%	Tercapai
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,03 (skala 5)	4,25	Tercapai
5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	99,65%	Tercapai
5b-CP	Persentase kepatuhan importir	80%	93,14%	Tercapai
6a-CP	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	116,84%	Tercapai
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	93,26	Tercapai
8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%	93,01%	Tercapai
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	70%	81,5%	Tercapai
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%	95,83%	Tercapai
9b-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	98,81%	Tercapai
9c-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	99,99%	Tercapai
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	93,83%	Tercapai
11a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	99,17%	Tercapai
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	96,48%	Tercapai

*) Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan mulai bulan November 2017 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Internal nomor : S-493/BC.08/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Perubahan Manual IKU, manual IKU untuk perhitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan diubah. Waktu penyelesaian untuk PIB yang mendapat jalur merah dikalikan 0,75 karena terdapat proses dalam jalur merah yang menjadi tanggung jawab dari pengguna jasa.

**) Realisasi sesuai target APBN-P



B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2019

Dalam upaya mencapai target dari seluruh Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, tentu terdapat hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian dan terdapat kendala yang dapat mengakibatkan target tidak tercapai. Untuk memastikan seluruh target Sasaran Strategis dapat tercapai, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk dapat memitigasi potensi masalah akan muncul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang membahas capaian masing-masing IKU dan isu terkini di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis KPPBC Tanjung Emas Tahun 2019, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis yang sering menjadi isu utama dalam kegiatan DKO, baik DKO di KPPBC TMP Tanjung Emas ataupun DKO di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, yaitu Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal. IKU dari Sasaran Strategis ini adalah "Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai".

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P. Realisasi penerimaan KPPBC TMP Tanjung Emas pada Tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp441,04 Milyar. Realisasi penerimaan per bulan Bea Masuk dan Bea Keluar KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel A.3
Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2019

Uraian	BM	BK	Total	Target s.d bulan	Realisasi s.d. bulan	Capaian s.d. bulan
Target APBN	1,866,315	105,932	1,972,247			
Target APBN-P	1,550,427	105,932	1,656,360			
Kenaikan/Penurunan	(315,887)		(315,887)			
Januari	190,321	10,342	200,664	7.22%	10.17%	140.92%
Februari	140,504	7,534	148,038	14.37%	17.68%	123.04%
Maret	94,839	9,169	104,008	21.48%	22.95%	106.86%
April	137,250	8,185	145,435	29.24%	30.33%	103.72%
Mei	127,629	9,066	136,696	38.78%	37.26%	96.08%
Juni	74,387	2,940	77,328	45.98%	41.18%	89.56%
Juli	141,842	7,529	149,371	55.38%	48.75%	88.03%
Agustus	153,988	6,000	159,988	64.47%	56.87%	88.20%
September	126,753	6,774	133,527	73.12%	64.98%	88.86%
Oktober	120,279	6,108	126,387	82.04%	71.39%	87.01%
November	151,757	4,842	156,599	90.81%	79.33%	87.35%
Desember	142,177	5,864	148,042	100.00%	101.79%	101.79%
Total Realisasi	1,601,731	84,359	1,686,090	100.00%	101.79%	101.79%

* Dalam Jutaan

Pada tabel realisasi penerimaan tersebut dapat dilihat untuk capaian di bulan Mei 2019, realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan berlanjut sampai dengan bulan November 2019.

Berikut ini adalah perbandingan realisasi penerimaan Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan pertumbuhannya jika dibandingkan dengan target masing-masing tahun.

Tabel A.4
Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan

No	Jenis Penerimaan	Target		Realisasi		Growth (y-o-y, %)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Bea Masuk	2,038,144.00	1,550,427.39	2,021,214.54	1,601,731.24	- 3,74%	- 20,75%
2	Bea Keluar	43,929.00	105,932.84	105,918.34	84,359.74	141.31%	- 20,35%
Total		2,082,073.00	1,656,360.23	2,127,132.87	1,686,090.98	- 0,77%	- 20,73%

* Dalam Jutaan

Penerimaan Bea Masuk (BM) s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp 1,601.73 Milyar atau 103,31% dari target APBN, turun 20.75% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp 419,48 Milyar. Menurunnya penerimaan BM dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Masuknya beberapa komoditas ke dalam Pusat Logistik Berikat (PLB) yaitu Besi Baja, Ban, dan MMEA yang mengakibatkan adanya penurunan potensi penerimaan dari sektor bea masuk. (Pada Tahun 2018, MMEA merupakan salah satu penyumbang terbesar pada KPPBC TMP Tanjung Emas).
2. Meningkatnya penggunaan Free Trade Agreement (FTA).
3. Adanya penurunan penerimaan BM dari Importasi atas Garmen.

Penerimaan Bea Keluar (BK) s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp 84,36 Milyar atau 79,64% dari target APBN, turun 20.35% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp 21,56 Milyar. Menurunnya penerimaan BK dikarenakan adanya penurunan ekspor veneer sebagai penyumbang Bea Keluar terbesar dikarenakan menurunnya permintaan veneer dari India dan produk ekspor veneer bersaing dengan produk dari negara Vietnam dan Afrika.

Untuk meningkatkan potensi penerimaan, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan akurasi pemeriksaan fisik dan dokumen dengan adanya kenaikan SPTNP.
2. Peningkatan pengawasan dengan adanya peningkatan SPSA.
3. Asistensi kepada Eksportir terkait Ekspor Barang terkena Bea Keluar.
4. Melaksanakan optimalisasi penagihan piutang.
5. Melaksanakan optimalisasi penerimaan pada Bandara, Kantor Pos, maupun DHL.
6. Melaksanakan optimalisasi Penggunaan Laboratorium.

Pada tanggal 18 Desember 2019, telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penerimaan T.A 2019 antara Kantor Wilayah beserta 9 (sembilan) satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dengan

pembahasan proyeksi masing-masing satuan kerja dalam menghimpun penerimaan pada tahun berjalan. Dari hasil FGD tersebut, ditetapkan KEP-465/WBC.10/2019 tentang Perubahan KEP-22/WBC.10/2019 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Per KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel A.5
Perubahan Distribusi Target Penerimaan Tahun 2019

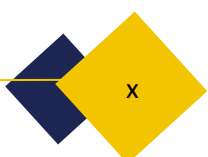
Uraian	Awal	Perubahan	Kenaikan/Penurunan
Bea Masuk	1,866,315,160,000	1,550,427,391,000	315,887,769,000
Bea Keluar	105,932,839,000	105,932,839,000	-
Total	1,972,247,999,000	1,656,360,230,000	315,887,769,000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019	ii
B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DI TAHUN 2019.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
Tugas dan Fungsi.....	2
Struktur Organisasi.....	3
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	5
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	6
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. PETA STRATEGIS ORGANISASI TAHUN 2019.....	12
B. TABLE BERISI: SS, IKU, DAN TARGET SESUAI DENGAN KONTRAK KINERJA TAHUN 2019.....	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2019	19
SS-1 KELANCARAN ARUS BARANG DAN PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF	19
SS-2 PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF	22
SS-3 PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL	24
SS-4 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI.....	28
SS-5 KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS ATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI.....	30
SS-6 PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA	35
SS-7 EDUKASI DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF	39
SS-8 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI	43
SS-9 PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL.....	46
SS-10SDM YANG KOMPETEN	55
SS-11ORGANISASI YANG <i>FIT FOR PURPOSE</i>	57
SS-12PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS	59
C. REALISASI ANGGARAN	64
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	66
BAB IV PENUTUP	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas 2019	ii
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas	4
Gambar 1.2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember Tahun 2019	7
Gambar 1.3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan Usia per 31 Desember 2019	8
Gambar 2.1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas 2019.....	13
Gambar 3.1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019	16
Gambar 2.1 Tabel Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan 5 Tahun Terakhir	22



DAFTAR TABEL

Tabel A.1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019.....iv	iv
Tabel A.2 Pencapaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 v	v
Tabel A.3 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2019.....vi	vi
Tabel A.4 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan.....vii	vii
Tabel A.5 Perubahan Distribusi Target Penerimaan Tahun 2019 viii	viii
Tabel 1.1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Pangkat dan Golongan per 31 Desember 2019 6	6
Tabel 1.2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Pangkat dan Golongan per 31 Desember 2019 7	7
Tabel 2.1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019..... 14	14
Tabel 3.1 Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 17	17
Tabel 3.2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2019 20	20
Tabel 3.3 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas 25	25
Tabel 3.4 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2019 25	25
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir 26	26
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2018 dan 2019 .. 26	26
Tabel 3.7 Perubahan Distribusi Target Penerimaan Tahun 2019..... 27	27
Tabel 3.8 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2019 27	27
Tabel 3.9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2019 28	28
Tabel 3.10 Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa 29	29
Tabel 3.11 Rincian Terbit Piutang Lancar Januari s.d. Desember 2019..... 31	31
Tabel 3.12 Saldo Akhir Piutang Lancar per 31 Desember 2019 32	32
Tabel 3.13 Penghitungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2019..... 34	34
Tabel 3.14 Daftar Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 36	36
Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2017 s.d. 2019 38	38
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi & Komunikasi .. 40	40
Tabel 3.17 Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat Tahun 2019..... 41	41
Tabel 3.18 Rekapitulasi Penerbitan SBP Tahun 2012 – 2019 44	44
Tabel 3.19 Rekapitulasi Penerbitan Surat Perintah Berlayar Tahun 2019..... 46	46
Tabel 3.20 Penyelenggaraan Kegiatan P2KP Tahun 2019 57	57
Tabel 3.21 Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Bulan Desember 2019 ... 63	63
Tabel 3.22 Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 63	63
Tabel 3.23 Realisasi Belanja Total Tahun 2019..... 64	64
Tabel 3.24 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 64	64
Tabel 3.25 Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 65	65
Tabel 3.26 Data Capaian Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Emas 2019 67	67



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas merupakan instansi vertikal DJBC yang bertanggung jawab dan berada di bawah Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016. Wilayah kerja KPPBC TMP Tanjung Emas meliputi Kota Semarang pada kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Semarang.

Tugas KPPBC TMP Tanjung Emas adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan pengawasan dan menyelenggarakan pelayanan kepabeanan dan cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain kedua Undang-Undang tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melaksanakan peraturan perundang-undangan turunan dari keduanya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPBC TMP Tanjung Emas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat Eselon III yang membawahi 1 Subbagian, 13 Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV), dan 12 Jabatan Fungsional Ahli (PFPD) serta 9 Jabatan Fungsional terampil (Pemeriksa Barang Impor).

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di KPPBC TMP Tanjung Emas sebanyak 7 seksi yang melaksanakan tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

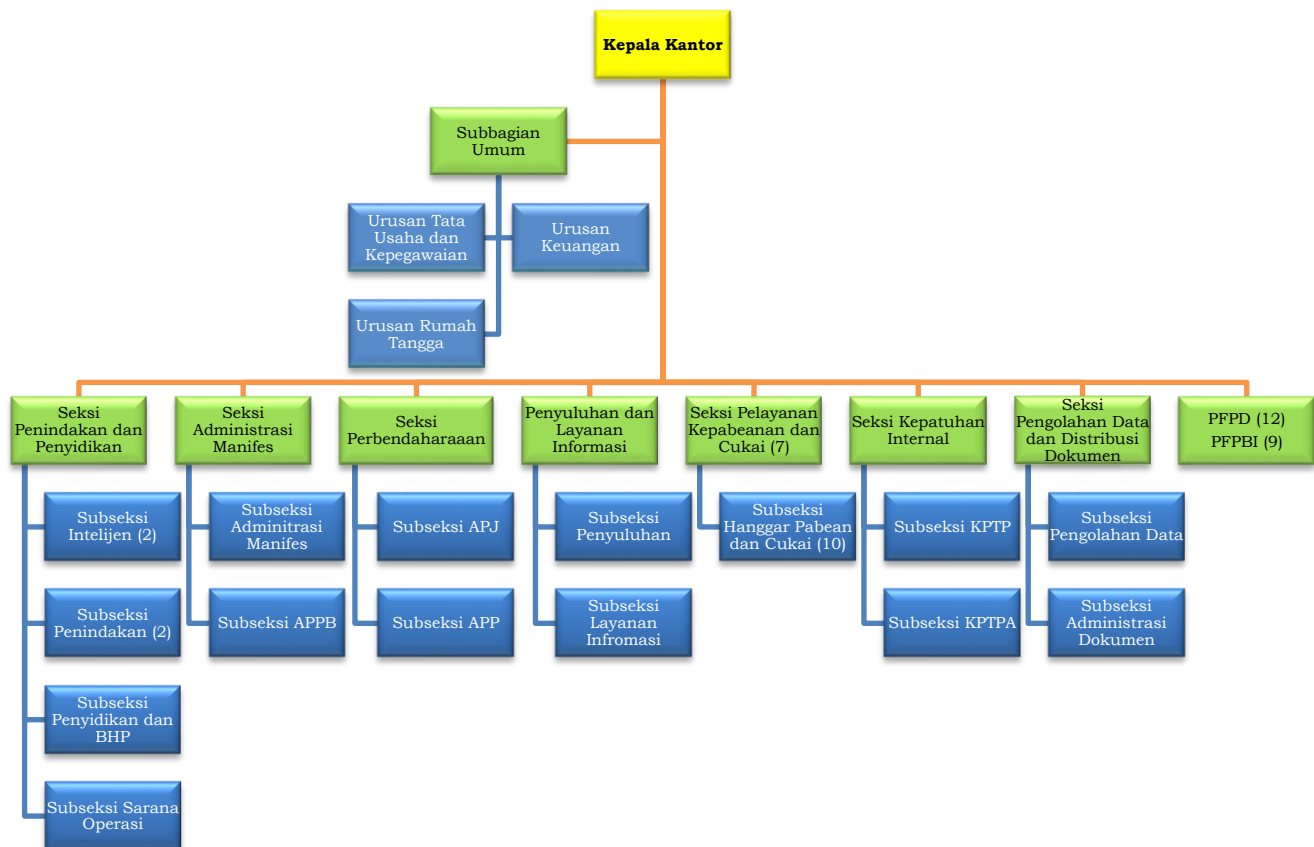
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan.

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta melakukan penyajian data kepabeanan dan cukai.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri dari 12 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen dan 9 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang Impor.

Berikut adalah bagan struktur KPPBC TMP Tanjung Emas:

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas



B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai instansi vertikal DJBC merupakan salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama memperlancar arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (sislognas), melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah maupun bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang. Dalam konteks perdagangan dan peningkatan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional.

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembiayaan nasional.

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;

4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Di samping itu, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melaksanakan kebijaksanaan dan program-program nasional yang telah ditetapkan serta program-program pemerintah lainnya. Maka sejalan dengan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perbaikan dalam menyelenggarakan pelayanan prima kepada seluruh pengguna layanan serta melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap hal-hal dan kegiatan yang berpotensi menjadi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 237 pegawai, baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun yang di luar lingkungan kantor yaitu di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, di Kantor Pos Lalu Bea Semarang, dan di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.

Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 203 orang (85,65%) dan pegawai perempuan sejumlah 34 orang (14,35%).

Tabel 1.1
Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas
Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2019

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	11	3	14
Eselon V	20	5	25
Fungsional (PFPD)	12	-	12
Fungsional (PFPBI)	9	-	9
Pelaksana Pemeriksa	140	22	162
Pelaksana Administrasi	2	4	6
Total	203	34	237

LAPORAN KINERJA 2019

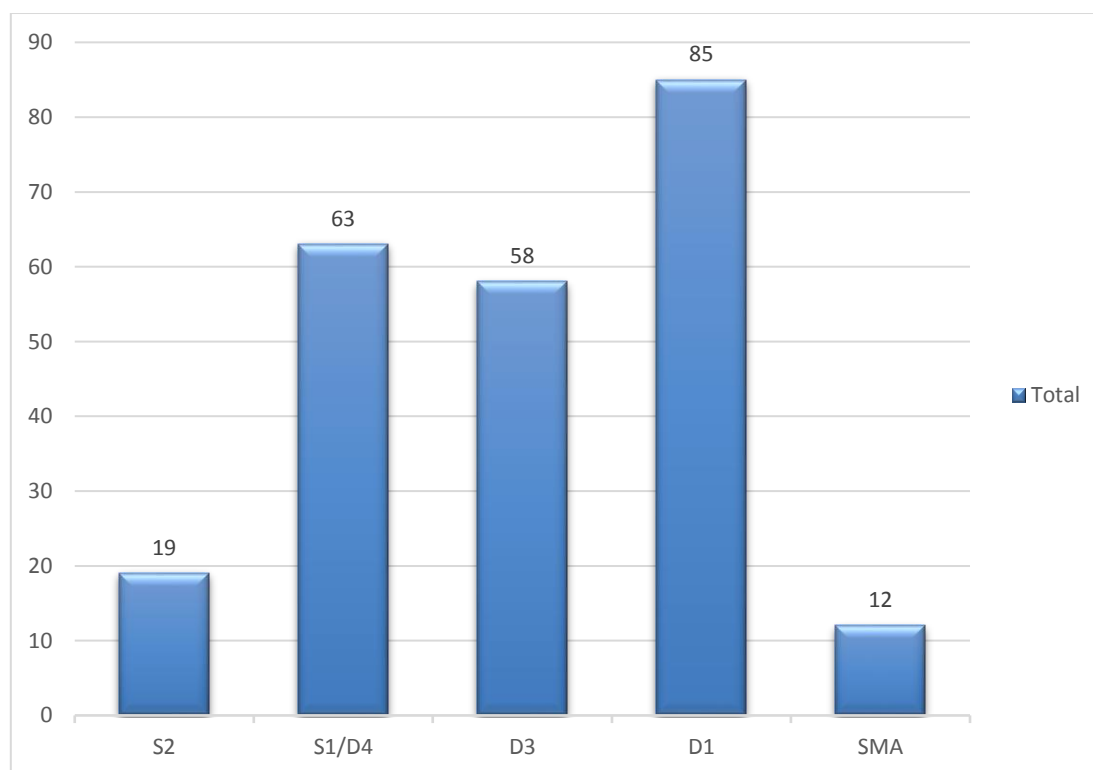
Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 6 orang (2,53%), Golongan III sejumlah 73 orang (30,8%), pegawai Golongan II sejumlah 158 orang (66,67%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I.

Tabel 1.2
Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas
Berdasarkan Pangkat dan Golongan per 31 Desember 2019

Golongan	Ruang					Jumlah	%
	A	B	C	D	E		
IV	5	1	-	-	-	6	2,53%
III	17	22	13	21	-	73	30,8%
II	17	52	58	31	-	158	66,67%
I	-	-	-	-	-	-	-
Total						237	100%

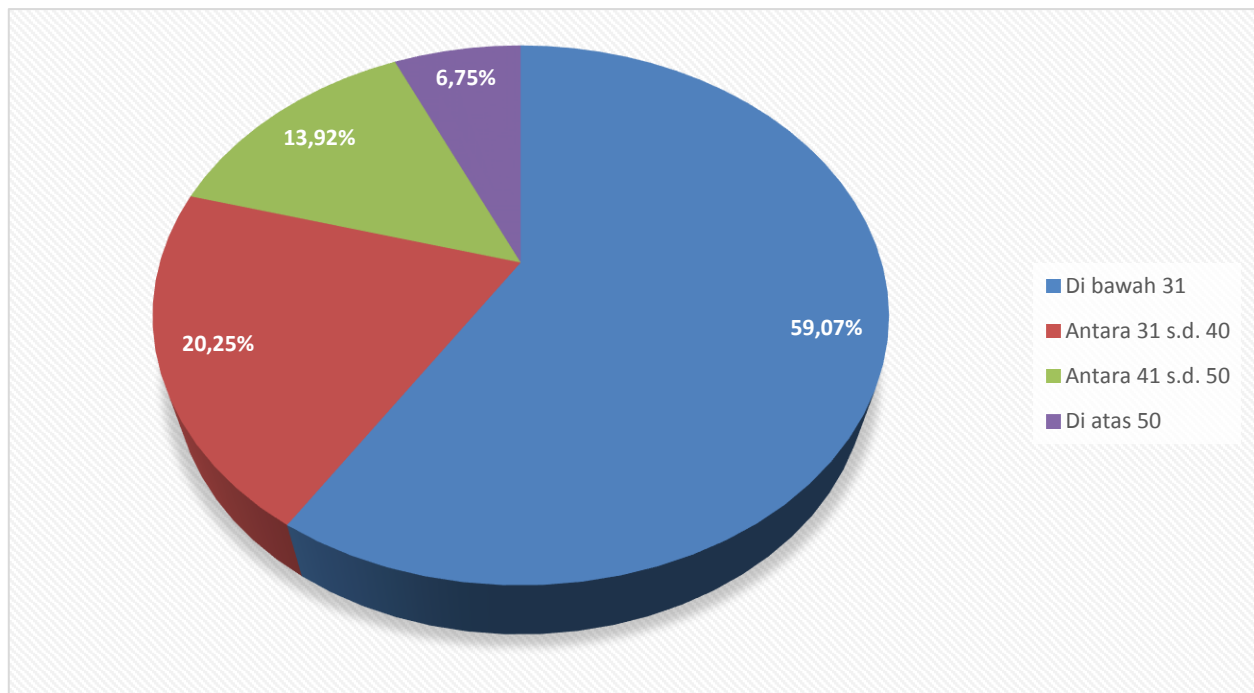
Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah Sarjana (S2) sejumlah 19 orang (8,02%), Sarjana (S1/D.4) sejumlah 63 orang (26,58%), Diploma III (D.3) sejumlah 58 orang (24,47%), Diploma I (D.1) sejumlah 85 orang (35,87%), SMA sejumlah 12 orang (5,06%), serta tidak terdapat pegawai yang memiliki gelar Doktor (S3), SMP dan SD.

Gambar 1.2
Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2019



Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan usia adalah 140 pegawai dengan usia di bawah 31 tahun (59,07%), 48 pegawai dengan usia 31 s.d 40 tahun (20,25%), 33 pegawai usia antara 41 s.d 50 tahun (13,92%) dan 16 pegawai dengan usia di atas 51 tahun (6,75%).

Gambar 1.3
Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas
berdasarkan Usia per 31 Desember 2019



D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja DJBC Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi;
- B. Peran strategis organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019, yang berisi Penetapan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

- A. Peta Strategis Organisasi Tahun 2019;
- B. Table berisi: SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait dengan Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan analisis IKU serta Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2019, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2019.

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2019

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

Narasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

- hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target;
- Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
- Kaitan pencapaian target tahun 2019 dengan target/sasaran dalam RENSTRA DJBC 2015-2019;
- Dalam setiap narasi IKU diharapkan juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk setiap IKU dilakukan pengukuran dengan:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisis terhadap:

1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
4. Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja.
5. Rencana aksi ke depan (menyesuaikan dengan penganggaran Tahun 2020).

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi *achievement* maupun inovasi dan penghargaan yang didapatkan. Dapat juga menampilkan terkait dengan kegiatan pelayanan, pengawasan dan penindakan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja/ Kontrak Kinerja Tahun 2019
- 2) Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019
- 3) Dokumen/data pendukung lain yang diperlukan



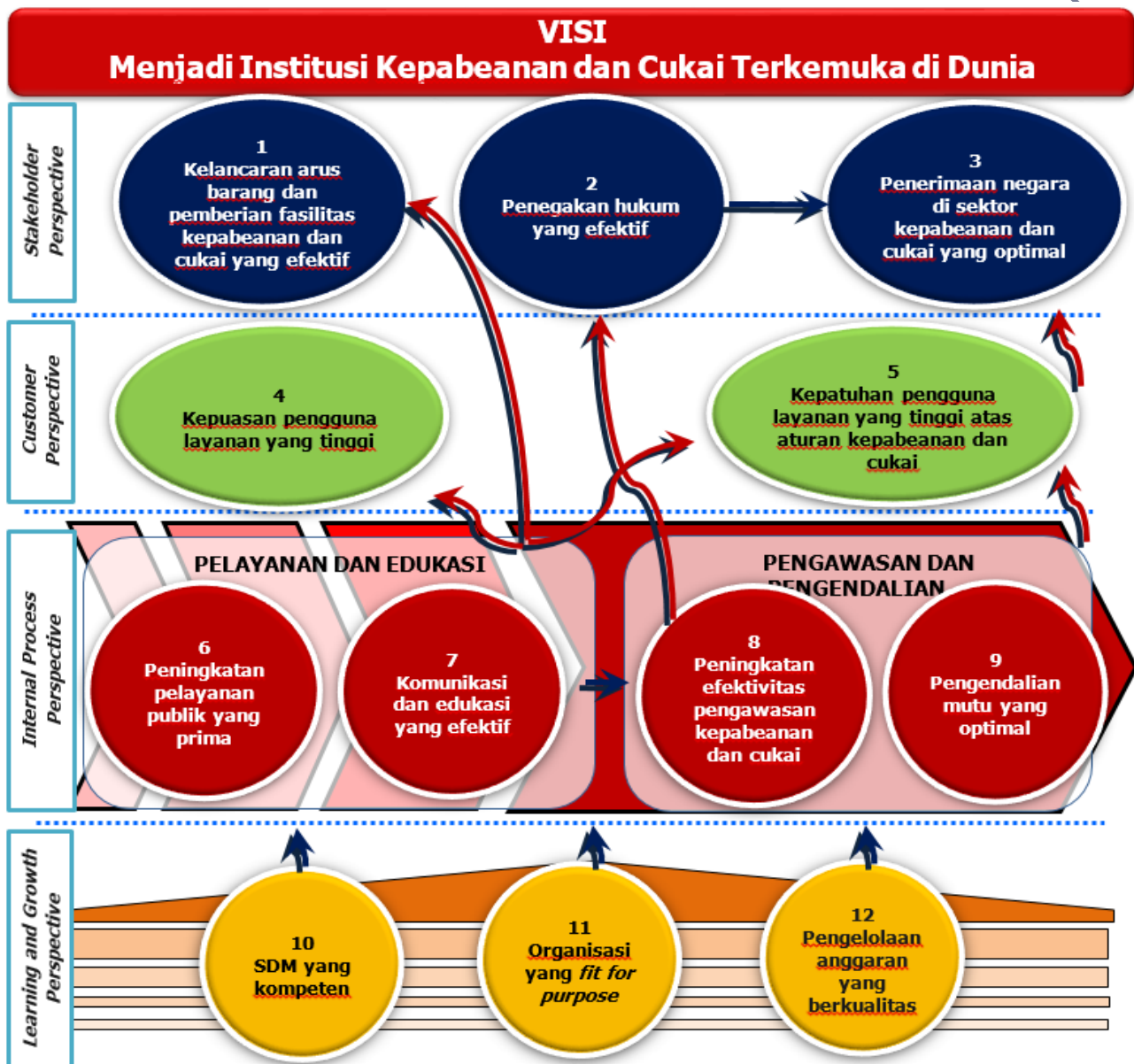
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PETA STRATEGIS ORGANISASI TAHUN 2019

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2019 KPPBC TMP Tanjung Emas disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja pada KPPBC TMP Tanjung Emas diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 tertuang dalam Kontrak Kinerja yaitu sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
PETA STRATEGI KPPBC TMP TANJUNG EMAS 2019



B. TABLE BERISI: SS, IKU, DAN TARGET SESUAI DENGAN KONTRAK KINERJA TAHUN 2019

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan IKU beserta target yang dituangkan dalam Rencana Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019

No SS	Nama SS	No IKU	Nama IKU	Target
Stakeholder Perspective				
1	Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,1 hari
2	Penegakan hukum yang efektif	2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	70%
3	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
Customer Perspective				
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,03 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%
		5b-CP	Persentase kepatuhan importir	80%
Internal Process Perspective				
6	Peningkatan pelayanan publik yang prima	6a-CP	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai	8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	90%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%
		9b-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%
		9c-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%
Learning and Growth Perspective				
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%
11	Organisasi yang fit for purpose	11a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

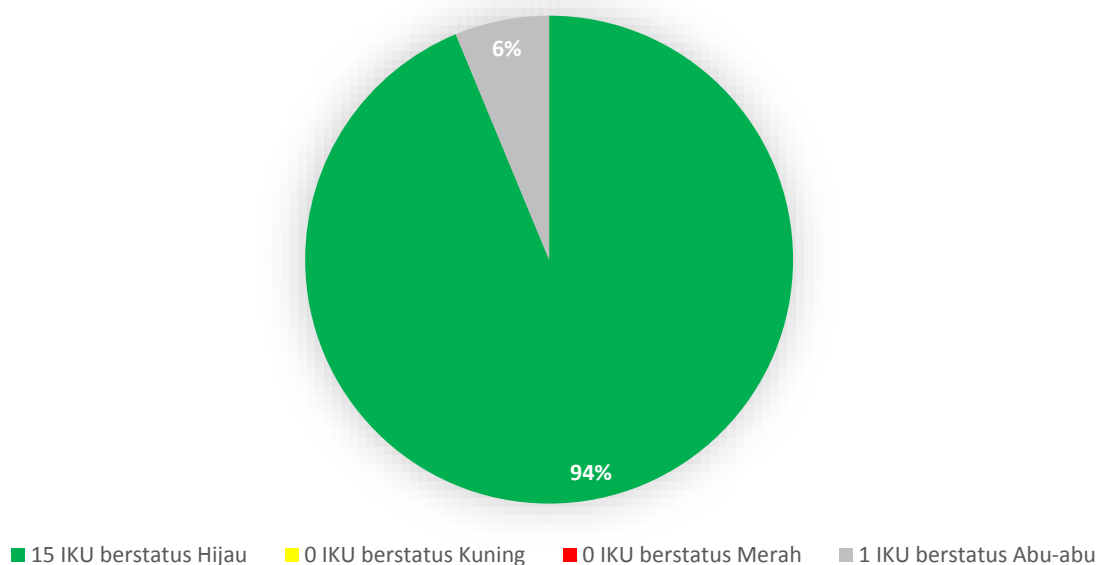
Berdasarkan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan antara Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, tingkat capaian kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian atas IKU dimaksud menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diadopsi oleh DJBC pada tahun 2019 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC). Konsep BSC merupakan konsep yang menilai kinerja suatu organisasi tidak hanya dari satu sisi atau cara pandang saja. Cara pandang atau perspektif yang dilihat adalah *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Capaian kinerja dinilai cara membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan target yang dicapai untuk masing-masing perspektif. Penilaian kinerja pada DJBC dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang terdapat dalam Peta Strategi *Kemenkeu-One* DJBC Tahun 2019.

Pada tahun 2019 KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki 12 (dua belas) Sasaran Program/Kegiatan yang harus dilaksanakan dengan indikator kinerja sebanyak 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 15 (lima belas) IKU dengan status “hijau” dan 1 (satu) IKU dengan status “abu-abu”. Data capaian dan target IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019 secara umum dan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Gambar 3.1
Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019



Tabel 3.1
Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019

No	No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective					110.90%
SS-1		Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif			120%
1	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,1 hari *)	0,71 hari	120%
SS-2		Penegakan hukum yang efektif			N/A
2	2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	70%	N/A	N/A
SS-3		Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			101.79%
3	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100% **)	101,79%	101.79%
Customer Perspective					101.75%
SS-4		Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			105.46%
4	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,03 (skala 5)	4,25	105.46%
SS-5		Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai			113.39%
5	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	99,65%	110.35%
6	5b-CP	Persentase kepatuhan importir	80%	93,14%	116.43%
Internal Process Perspective					115.51%
SS-6		Peningkatan pelayanan publik yang prima			116.84%
7	6a-CP	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	116,84%	116.84%
SS-7		Komunikasi dan edukasi yang efektif			116.58%
8	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	93,26	116.58%
SS-8		Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai			108.77%
9	8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%	93,01%	101.10%
10	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	70%	81,5%	116.43%
SS-9		Pengendalian mutu yang optimal			119.21%
11	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%	95,83%	120%
12	9b-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	98,81%	120%
13	9c-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	99,99%	117.64%

No	No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Learning and Growth Perspective					110.58%
SS-10		SDM yang kompeten			120%
14	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	93,83%	120%
SS-11		Organisasi yang fit for purpose			110.19%
15	11a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	99,17%	110.19%
SS-12		Pengelolaan anggaran yang berkualitas			101.56%
16	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	96,48%	101.56%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					112.16%

*) Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan mulai bulan November 2017 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Internal nomor : S-493/BC.08/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Perubahan Manual IKU, manual IKU untuk perhitungan waktu penyelesaian proses kepabeanaan diubah. Waktu penyelesaian untuk PIB yang mendapat jalur merah dikalikan 0,75 karena terdapat proses dalam jalur merah yang menjadi tanggung jawab dari pengguna jasa.

**) Realisasi sesuai target APBN-P

B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU TAHUN 2019

SS-1 KELANCARAN ARUS BARANG DAN PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI YANG EFEKTIF

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, memiliki peran strategis dalam mewujudkan kelancaran arus barang masuk dan keluar daerah pabean. Kelancaran arus barang merupakan salah satu parameter untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri. Salah satu IKU dalam Sasaran Strategis “Kelancaran Arus Barang dan Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang Efektif” yang diturunkan (cascading) dari IKU Direktur Jenderal ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan (*Customs Clearance Time*). Indeks Capaian SS “Kelancaran Arus Barang dan Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan Cukai Yang Efektif” pada tahun 2019 adalah sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan”.

1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Alur proses tersebut sesuai yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) juga merupakan salah satu komponen dalam rantai logistik yang diukur dengan parameter waktu *dwelling time*. *Dwelling time* adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan *dwelling time* adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan). *Dwelling time* memegang peranan penting karena berkenaan dengan waktu yang harus dilalui oleh peti kemas selama masih berada di dalam area pelabuhan untuk menunggu proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan penyelesaian administrasi pelabuhan. *Dwelling time* yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi.

Menurut definisinya, *dwelling time* dapat dibagi menjadi *pre-clearance*, *custom clearance*, dan *post clearance*. Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS). Aktivitas *customs clearance* adalah kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan sampai dengan adanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Aktivitas *post-clearance* adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan. Peran DJBC dalam mempercepat proses penyelesaian dokumen kepabeanan (*customs clearance*) akan berdampak secara langsung pada waktu *dwelling*

time, sehingga kinerja DJBC dalam penurunan waktu penyelesaian proses kepabeanaan akan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia.

IKU penyelesaian proses kepabeanaan mulai ditetapkan sejak tahun 2014 dengan level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *minimize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Direktur Jenderal (Kemenkeu One) yang diturunkan ke beberapa kantor yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas. Target IKU untuk tahun 2019 adalah 1,10 hari atau lebih cepat 0,24 hari jika dibandingkan terget tahun 2018 yaitu 1,34 hari. Perhitungan waktu penyelesaian proses kepabeanaan dihitung dari mulai dari PIB mendapatkan penetapan jalur sampai dengan penerbitan SPPB. Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

$$\frac{[(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan} \times \text{jumlah PIB importir MITA}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan} \times \text{jumlah PIB jalur Hijau}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan} \times \text{jumlah PIB jalur Kuning}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanaan} \times \text{jumlah PIB jalur Merah}) \times \text{Bobot}]}$$

Jumlah seluruh dokumen PIB

Hal-hal yang dikecualikan dari penghitungan capaian IKU adalah

- Dokumen PIB Jalur Kuning dan Jalur Merah yang dikenakan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) karena atas barang yang diimpor wajib dilengkapi dokumen perizinan impor dari instansi terkait.
- Dokumen PIB yang sampai akhir periode pelaporan capaian IKU belum mendapat SPPB tidak diperhitungkan pada periode pelaporan berjalan, tetapi menjadi perhitungan capaian IKU pada periode pelaporan berikutnya.

Capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanaan tahun 2019 adalah 0,71 hari dengan indeks capaian 120% (hijau) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,1 hari. Hal-hal yang mendukung tercapainya target tersebut karena adanya monitoring waktu layanan, Aplikasi Ceisa relatif stabil, adanya penambahan pemeriksa barang pada bulan Juli 2019 pasca move PIBT serta optimalisasi SDM yang baik. Berikut ini adalah data capaian IKU customs clearance time selama tahun 2019.

Tabel 3.2
Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2019

No.	Bulan	MITA			Hijau			Kuning			Merah			Realisasi
		Rata-rata	Σ dok	Total Waktu	Rata-rata	Σ dok	Total Waktu	Rata-rata	Σ dok	Total Waktu	Rata-rata	Σ dok	Total Waktu	
1	Januari	0,00	512	0,00	0,00	3.564	0,00	1.37	263	360.68	2.93	1776	3906.85	0,70
2	Februari	0,00	435	0,00	0,00	2.779	0,00	2.16	201	435.10	3.71	1476	4109.63	0,93
3	Maret	0,00	548	0,00	0,00	2.620	0,00	1.50	104	156.34	2.49	791	1478.14	0,40
4	April	0,00	626	0,00	0,00	3.061	0,00	1.83	189	345.58	3.48	1971	5149.21	0,94

LAPORAN KINERJA 2019

No.	Bulan	MITA			Hijau			Kuning			Merah			Realisasi
		Rata-rata	Σ dok	Total Waktu	Rata-rata	Σ dok	Total Waktu	Rata-rata	Σ dok	Total Waktu	Rata-rata	Σ dok	Total Waktu	
5	Mei	0,00	551	0,00	0,00	2.654	0,00	1.90	192	364.93	3.12	2212	5176.08	0,99
6	Juni	0,00	432	0,00	0,00	1.756	0,00	0.97	106	102.75	2.31	1,124	1949.23	0,60
7	Juli	0,00	605	0,00	0,00	3.267	0,00	1.42	246	349.61	2.58	1,637	3168.55	0,61
8	Agustus	0,00	612	0,00	0,00	3.169	0,00	1.73	60	103.68	3.36	1,827	4597.42	0,83
9	September	0,00	563	0,00	0,00	3.238	0,00	1.31	62	81.49	2.73	1706	3495.03	0,64
10	Oktober	0,00	564	0,00	0,00	3.477	0,00	1.22	116	141.27	2.65	1426	2836.24	0,53
11	November	0,00	628	0,00	0,00	3.530	0,00	1.31	61	80.01	2.63	1687	3328.56	0,58
12	Desember	0,00	636	0,00	0,00	3.315	0,01	1.49	151	225.39	3.07	1602	3687.10	0,69
Tahun 2019														0,71

Pada tabel capaian tersebut dapat diketahui bahwa waktu penyelesaian proses kepabeanaan paling cepat adalah pada Bulan Maret 2019. Hal tersebut salah satunya disebabkan adanya penurunan jumlah kegiatan importasi yang berasal dari Tiongkok yang dipengaruhi libur Hari Raya Imlek. Selain itu juga disebabkan adanya menurunnya jumlah dan persentase dokumen PIB jalur merah, yaitu sejumlah 791 PIB dan sebesar 19,47% (terendah selama tahun 2019).

Kemudian waktu penyelesaian proses kepabeanaan paling lama ada di Bulan Mei 2019, yang disebabkan adanya kenaikan importasi menjelang Hari Raya Idul Fitri, meningkatnya jumlah dan persentase dokumen PIB jalur merah yaitu sejumlah 2.212 PIB dan sebesar 39,44% (tertinggi selama tahun 2019). Selain itu juga disebabkan hari kerja dalam bulan tersebut yang sedikit karena cuti bersama.

Dalam upaya mencapai target kinerja waktu penyelesaian proses kepabeanaan ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2019. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

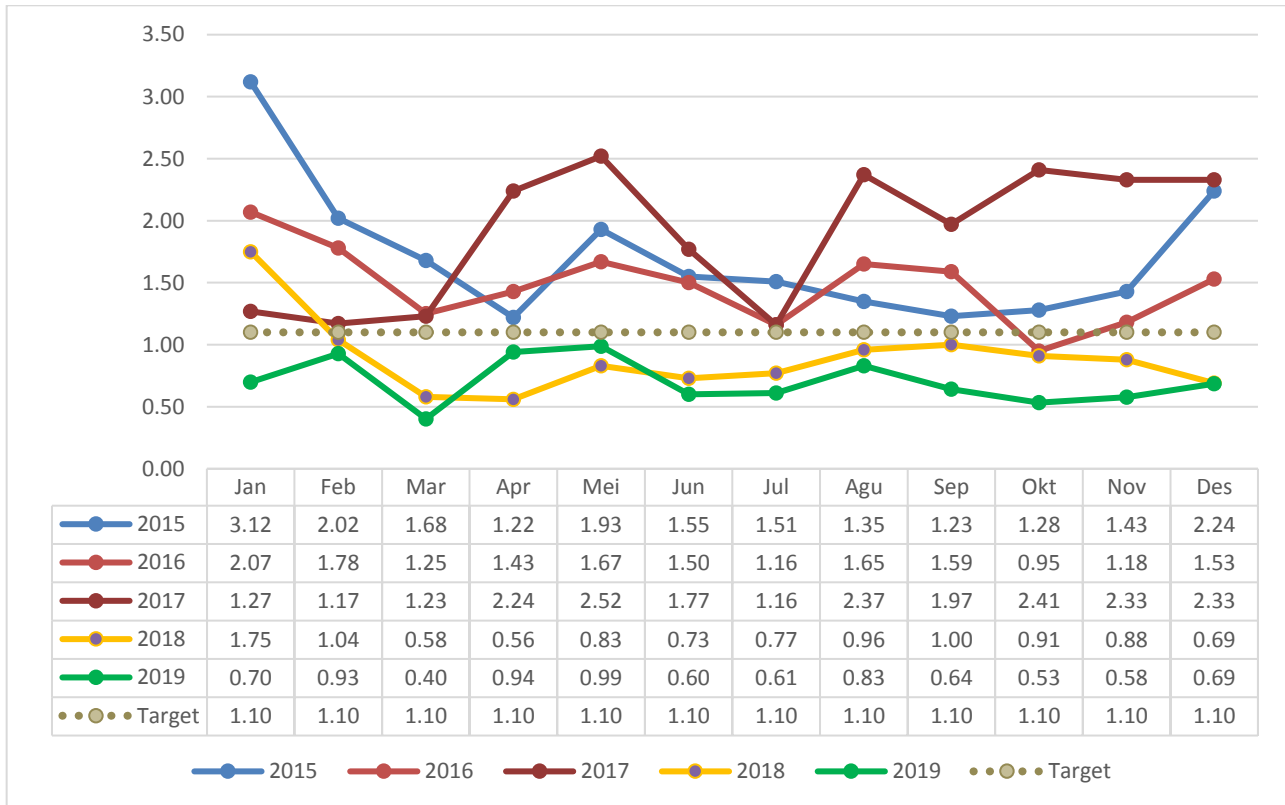
- Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan *Forklift* yang ada pada TPKS belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan jumlah kontainer barang impor.
- Masih terdapat pengguna jasa yang tidak mengumpulkan kesiapan data secara tepat waktu.
- Kondisi cuaca hujan yang dapat menghambat proses pemeriksaan fisik barang impor jalur merah.

KPPCB TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan pihak TPKS agar melakukan penambahan TKBM dan *Forklift*.
- Menyampaikan dan menghimbau kepada para pengguna jasa untuk mengumpulkan dokumen 1 (satu) hari setelah tanggal PIB.
- Menyiapkan terpal dan melakukan koordinasi dengan pihak TPKS untuk melakukan relokasi kontainer yang sudah selesai pada ruang *long room*.

Berikut tampilan capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanaan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dalam tabel dan grafis.

Gambar 3.2
Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan 5 Tahun Terakhir



Dari grafik di atas, dapat diambil beberapa catatan sebagai berikut:

- Polarisasi IKU ini adalah *minimize*, yang artinya semakin rendah angka yang dihasilkan, maka capaian akan semakin tinggi. Pada tahun 2019, capaian IKU selalu mencapai target dan mempunyai tren menurun.
- Jika dibandingkan capaian selama 5 tahun terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2019 merupakan capaian tertinggi di antara capaian yang ada.

SS-2 PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

Sasaran strategis Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk mengamankan hak-hak keuangan negara dan merupakan salah satu bentuk perlindungan DJBC terhadap masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor, dan barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum. Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis penegakan hukum yang efektif adalah persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21). Pada tahun 2019, tidak ada capaian untuk Sasaran Strategis penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat sehingga capaiannya N/A (Abu-abu).

2a-CP Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepacean dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tindak Pidana Kepabeahan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeahan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) dihitung dengan membandingkan jumlah berkas yang sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) dengan jumlah SPDP. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat yang diterbitkan dalam rangka tindak lanjut hasil penindakan yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran tindak pidana di bidang kepacean dan cukai. SPDP diterbitkan kepada tenaga penyidik untuk melakukan penyidikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan membuktikannya dengan melakukan wawancara, permintaan keterangan dari saksi ahli, dan pengumpulan bukti-bukti pelanggaran. Seluruh berkas penyidikan yang telah dilakukan nantinya diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilimpahkan ke proses hukum selanjutnya yang berada di luar wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai bukti penerimaan berkas, pihak Kejaksaan menerbitkan P-21 yaitu berkas penerimaan alat bukti dan barang pembuktian, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Berkas perkara TPA yang berstatus P21}}{\sum \text{SPDP TPA}} \times 90\% + \frac{\sum \text{Berkas perkara TPPU yang berstatus P21}}{\sum \text{SPDP TPPU}} \times 10\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Direktur Jenderal dan ditetapkan dengan target 70%. Data capaian diperoleh dari data base penyidikan dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2019, tidak terdapat kegiatan penyidikan (SPDP) yang dilakukan oleh pejabat/pegawai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP Tanjung Emas. Oleh karena itu, capaian Indikator Kinerja Utama yaitu N/A (abu-abu).

SS-3 PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, DJBC memiliki target penerimaan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Penerimaan tersebut berupa penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pemenuhan penerimaan negara merupakan salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Indeks Capaian Sasaran Strategis pendapatan negara yang optimal pada tahun 2019 sebesar 101.79% (hijau). Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai". Penerimaan bea dan cukai meliputi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sedangkan target penerimaan bea dan cukai ditetapkan berdasarkan APBN atau APBNP.

3a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s.d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \times 100\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan sebesar nilai target pada APBN/APBN-P. Data capaian diperoleh dari data billing CEISA dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini merupakan IKU Kepala Kantor dan tidak diturunkan (*cascade*) kepada unit eselon IV.

Pada tahun 2019, penetapan target dalam APBN/APBN-P yang diturunkan ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA 2019

Tabel 3.3
Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019

Uraian	Bea Masuk Netto		Bea Keluar		Total	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Target Per 31 Desember 2019	1.550.427.391.000	100,00%	105.932.839.000	100,00%	1.656.360.230.000	100,00%
Capaian	1.601.731.238.812	103,31%	84.359.740.511	79,64%	1.686.090.979.323	101,79%
%Capaian IKU		103,31%		79,64%		101,79%
Kelebihan/ Kekurangan Capaian Sampai Akhir Tahun	51.303.847.812	3,31%	(21.573.098.489)	-20,36%	29.730.749.323	1,79%

Dari tabel diatas dapat diperoleh data bahwa penerimaan Bea Masuk mencapai target yaitu 103,31% dari target yang ditetapkan. Namun berkebalikan dengan penerimaan Bea Keluar yang tidak mencapai target, hanya 79,64%. Namun surplus dari penerimaan dari Bea Masuk dapat menutupi kekurangan tersebut sehingga total penerimaan sebesar Rp. 1.686.090.979.323,00. Capaian IKU "Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai" yang ditargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 101,79% (hijau).

Realisasi penerimaan per bulan Bea Masuk dan Bea Keluar KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2019

Uraian	BM	BK	Total	Target s.d bulan	Realisasi s.d. bulan	Capaian s.d. bulan
Target APBN	1,866,315,160,000	105,932,839,000	1,972,247,999,000			
Target APBN-P	1,550,427,391,000	105,932,839,000	1,656,360,230,000			
Kenaikan/Penurunan	(315,887,769,000)		(315,887,769,000)			
Januari	190,321,691,375	10,342,372,944	200,664,064,319	7.22%	10.17%	140.92%
Februari	140,504,032,575	7,534,965,954	148,038,998,529	14.37%	17.68%	123.04%
Maret	94,839,169,764	9,169,378,460	104,008,548,224	21.48%	22.95%	106.86%
April	137,250,436,787	8,185,533,000	145,435,969,787	29.24%	30.33%	103.72%
Mei	127,629,973,802	9,066,527,153	136,696,500,955	38.78%	37.26%	96.08%
Juni	74,387,886,969	2,940,542,000	77,328,428,969	45.98%	41.18%	89.56%
Juli	141,842,185,080	7,529,767,000	149,371,952,080	55.38%	48.75%	88.03%
Agustus	153,988,161,572	6,000,797,000	159,988,958,572	64.47%	56.87%	88.20%
September	126,753,107,845	6,774,659,000	133,527,766,845	73.12%	64.98%	88.86%
Oktober	120,279,546,846	6,108,110,000	126,387,656,846	82.04%	71.39%	87.01%
November	151,757,127,225	4,842,603,000	156,599,730,225	90.81%	79.33%	87.35%
Desember	142,177,918,972	5,864,485,000	148,042,403,972	100.00%	101.79%	101.79%
Total Realisasi	1,601,731,238,812	84,359,740,511	1,686,090,979,323	100.00%	101.79%	101.79%

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Target	2.221,82	1.862,93	2.045,69	2.082.043	1.656.360
Realisasi					
Bea Masuk	1.379,89	1.755,98	2.099,77	2.021.214	1.601.731
Bea Keluar	1,67	11,87	43,89	105.918	84.359
Cukai	818,79	3,33	-	-	-
Total Realisasi	2.200,35	1.771,18	2.145,88	2.127.132	1.686.090
% Capaian	99,03%	95,08%	104,90%	102,17%	101,79%

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2018 dan 2019

No	Jenis Penerimaan	Target		Realisasi		Growth (y-o-y, %)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Bea Masuk	2,038,144.00	1,550,427.39	2,021,214.54	1,601,731.24	- 3,74%	- 20,75%
2	Bea Keluar	43,929.00	105,932.84	105,918.34	84,359.74	141.31%	- 20,35%
Total		2,082,073.00	1,656,360.23	2,127,132.87	1,686,090.98	- 0,77%	- 20,73%

* Dalam Jutaan

Tren penerimaan selama 5 (lima) tahun terakhir relatif tidak stabil baik tren naik ataupun tren turun. Untuk penerimaan tahun 2019 merupakan tahun dimana penerimaannya adalah yang terendah dari tahun yang lain. Penerimaan Bea Masuk (BM) Tahun 2019 sebesar Rp 1,601.73 Milyar atau 103,31% dari target APBN, turun 20.75% dari Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 419,48 Milyar. Menurunnya penerimaan BM dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Masuknya beberapa komoditas ke dalam Pusat Logistik Berikat (PLB) yaitu Besi Baja, Ban, dan MMEA yang mengakibatkan adanya penurunan potensi penerimaan dari sektor bea masuk. (Pada Tahun 2018, MMEA merupakan salah satu penyumbang terbesar pada KPPBC TMP Tanjung Emas).
2. Meningkatnya penggunaan Free Trade Agreement (FTA).
3. Adanya penurunan penerimaan BM dari Importasi atas Garmen.

Penerimaan Bea Keluar (BK) Tahun 2019 sebesar Rp 84,36 Milyar atau 79,64% dari target APBN, turun 20.35% dari Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 21,56 Milyar. Menurunnya penerimaan BK dikarenakan adanya penurunan ekspor veneer sebagai penyumbang Bea Keluar terbesar dikarenakan menurunnya permintaan veneer dari India dan produk ekspor veneer bersaing dengan produk dari negara Vietnam dan Afrika.

Pada bulan Mei 2019, realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan berlanjut sampai dengan bulan November 2019. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan akurasi pemeriksaan fisik dan dokumen dengan adanya kenaikan SPTNP.
2. Peningkatan pengawasan dengan adanya peningkatan SPSA.

3. Asistensi kepada Eksportir terkait Ekspor Barang terkena Bea Keluar.
4. Melaksanakan optimalisasi penagihan piutang.
5. Melaksanakan optimalisasi penerimaan pada Bandara, Kantor Pos, maupun DHL.
6. Melaksanakan optimalisasi Penggunaan Laboratorium.

Pada tanggal 18 Desember 2019, telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penerimaan T.A 2019 antara Kantor Wilayah beserta 9 (sembilan) satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dengan pembahasan proyeksi masing-masing satuan kerja dalam menghimpun penerimaan pada tahun berjalan. Dari hasil FGD tersebut, ditetapkan KEP-465/WBC.10/2019 tentang Perubahan KEP-22/WBC.10/2019 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Per KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perubahan Distribusi Target Penerimaan Tahun 2019

Uraian	Awal	Perubahan	Kenaikan/Penurunan
Bea Masuk	1,866,315,160,000	1,550,427,391,000	315,887,769,000
Bea Keluar	105,932,839,000	105,932,839,000	-
Total	1,972,247,999,000	1,656,360,230,000	315,887,769,000

Selain penerimaan bea masuk, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melakukan pungutan terhadap penerimaan pajak dalam rangka impor. Realisasi penerimaan PDRI tidak menjadi penerimaan bagi DJBC oleh karena itu tidak dimasukkan ke dalam target penerimaan. Total penerimaan PDRI yang dipungut KPPBC TMP Tanjung Emas sampai pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.557.888.160.721. Rincian penerimaan PDRI tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2019

Uraian	PPN Impor	PPn BM	PPh Impor	Total PDRI
Januari	562.006.352.791	-	224.807.369.123	786.813.721.914
Februari	480.589.934.365	536.743.000	191.527.274.642	672.653.952.007
Maret	397.813.985.135	118.000	147.385.239.000	545.199.342.135
April	592.876.018.989	2.111.000	271.738.021.680	864.616.151.669
Mei	488.838.500.533	254.361.000	241.200.774.000	730.293.635.533
Juni	344.469.978.765	-	137.361.865.000	481.831.843.765
Juli	544.124.988.297	-	244.038.540.000	788.163.528.297
Agustus	546.487.185.650	68.056.000	186.290.980.000	732.846.221.650
September	541.818.066.760	-	184.788.386.654	726.606.453.414
Oktober	511.839.926.696	-	174.825.639.000	686.665.565.696
November	605.827.492.000	-	198.106.822.000	803.934.314.000
Desember	553.578.596.641	-	184.684.834.000	738.263.430.641
Jumlah	6.170.271.026.622	861.389.000	2.386.755.745.099	8.557.888.160.721

SS-4 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi pada tahun 2019 sebesar 105,46% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks kepuasan pengguna jasa”.

4a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa merupakan tingkat kepuasan pengguna layanan di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas atas pelayanan yang diberikan. Responden survei adalah pengguna layanan/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanaan dan Cukai pada KPPBC TMP Tanjung Emas. Nilai Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Tujuan dari IKU ini adalah mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan DJBC sehingga atas kekurangan yang dirasakan oleh pengguna jasa DJBC dapat memperbaiki kekurangan tersebut.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang Kepabeanaan dan Cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dilaksanakan secara *online*. Berikut adalah skala indeks survei:

Tabel 3.9
Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2019

Indeks	Keterangan
1,00 – 1,80	Tidak Puas
1,81 – 2,60	Kurang Puas
2,61 – 3,40	Cukup Puas
3,41 – 4,20	Puas
4,21 – 5,00	Sangat Puas

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderat* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU *cascading* dari Kanwil DJBC Jateng dan D.I. Yogyakarta. Untuk tahun 2019 target capaian indeks kepuasan pengguna layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 4,03 (indeks 5). Target ini naik 0,03 dari tahun sebelumnya yaitu 4,00 (indeks 5).

LAPORAN KINERJA 2019

Survei kepuasan pengguna jasa untuk tahun 2019 dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng dan D.I. Yogyakarta nomor ND-38/WBC.10/2020 tanggal 9 Januari 2020 hal Laporan Hasil Survey Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2019, indeks kepuasan pengguna layanan KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 4,25 (skala 5) dengan katagori “sangat puas” dari target 4 (skala 5) sehingga indeks capaian IKU-nya adalah 105,46% (hijau).

Berikut adalah perbandingan hasil survei 2016, 2017, 2018 dan 2019 dari tiap-tiap indikatornya:

Tabel 3.10
Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Indikator	Hasil 2016	Hasil 2017	Hasil 2018	Hasil 2019
Sistem dan Prosedur Pelayanan				
Kejelasan Prosedur Pelayanan	3,78	4,14	4,15	4,29
Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,81	4,11	4,08	4,19
Kejelasan Biaya Pelayanan	3,67	4,23	4,09	4,27
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,73	3,90	4,22	4,29
Kejelasan Persyaratan Administrasi	3,81	4,13	4,12	4,29
Pegawai dan Petugas Pelayanan				
Kecepatan Petugas Pelayanan	3,72	3,87	4,14	4,26
Kedisiplinan Pegawai	3,69	3,98	4,08	4,23
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	3,99	4,16	4,03	4,40
Keahlian dan Keterampilan Pegawai	3,69	3,99	3,97	4,19
Keadilan Petugas Pelayanan	3,57	4,07	4,27	4,28
Integritas Pegawai	3,57	4,33	4,30	4,37
Sarana dan Prasarana Kantor				
Kenyamanan Loker Pelayanan	3,99	4,41	-	4,42
Kebersihan Kantor	4,01	4,45	-	4,35
Kenyamanan Ruang Tunggu	4,00	4,38	-	4,35
Kenyamanan Toilet	3,58	4,00	-	4,09
Kejelasan Tata Ruang	3,89	4,26	-	4,35
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	3,90	4,32	-	4,33
Ketersediaan Area Parkir	2,86	3,14	-	-
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Utama	-	-	4,22	-
Kenyamanan Sarana dan Prasarana Utama	-	-	4,23	-
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung	-	-	4,14	-
Kenyamanan Sarana dan Prasarana Pendukung	-	-	4,12	-
Layanan Informasi				
Ketersediaan Layanan Informasi	3,93	4,23	-	4,19
Kejelasan Layanan Informasi	3,85	3,99	4,08	4,15
Kemudahan Mendapatkan Informasi	3,89	4,03	4,05	4,15
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	3,73	4,11	4,01	4,13
INDEKS AKHIR	3,76	4,09	4,03	4,25

Dari 21 indikator yang dinilai, seluruhnya mendapatkan kategori Puas. Indikator dengan Indeks tertinggi adalah indikator Kenyamanan Loker Pelayanan yaitu sebesar 4,42, sedangkan Indikator dengan Indeks terendah adalah indikator Kenyamanan Toilet yaitu sebesar 4,09. Dapat disimpulkan bahwa deviasi antar indikator cukup besar. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2018, seluruh indikator mengalami peningkatan Indeks, dengan indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah indikator Keramahan dan Kesopanan Pegawai (naik 0,27).

Hal-hal yang mendukung tercapainya rencana/target adalah dengan selalu memperbaiki pelayanan, baik dari segi sarana prasarana maupun kualitas sumber daya manusia yang selalu di tingkatkan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Pelatihan Client Service Charter kepada pegawai frontdesk agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa.
2. Sharing session yang rutin dilakukan bersama seluruh pengguna jasa dan dikemas dalam acara Coffee Morning.
3. Pra-survei dalam bentuk Survei Kepuasan Pengguna Jasa yang dilaksanakan Mandiri.
4. Adanya tindak lanjut dari hasil Pra-survei yang dilaksanakan Mandiri.
5. Selalu update peraturan terbaru dalam bentuk Sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Memberikan fasilitas dan platform yang dapat memberikan kemudahan informasi terkait pelayanan kepada pengguna jasa.

SS-5 KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS ATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi yang tercermin dari tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam menjalankan segala ketentuan/peraturan yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi pada tahun 2019 sebesar 113,39% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan" dan "Persentase kepatuhan importir".

5a-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

Piutang yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah piutang lancar. Piutang lancar adalah jumlah piutang yang terbit sejak 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2018 dan piutang yang terbit sejak 1 Januari s.d. 31 Oktober 2019 ditambah piutang yang terbit 1 November s.d. 31 Desember 2019 dalam hal piutang tersebut telah diselesaikan di tahun 2019.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah penyelesaian piutang lancar}}{\text{Jumlah piutang lancar}} \times 100\%$

LAPORAN KINERJA 2019

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dan ditetapkan dengan target 90,3%. Data capaian diperoleh dari Laporan Bulanan Piutang (LP1 dan LP2) sesuai dengan P-47/BC/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-58/BC/2011, dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

Berikut ini merupakan data Piutang KPPBC TMP Tanjung Emas 1 Januari s.d. 31 Desember 2019:

Saldo Awal Piutang Lancar	: Rp. 13.488.976.419
Koreksi Saldo Awal Lancar	: (Rp. 34.477.760)
Terbit Piutang Lancar	: Rp. 576.493.715.235
Mutasi Piutang Lancar	: Rp. 587.900.505.894
Saldo Akhir Piutang Lancar	: Rp. 2.047.708.000

Nilai piutang lancar yang terbit dan saldo akhir piutang lancar tidak termasuk piutang yang terbit bulan November s.d. Desember 2019 yang belum dilunasi sampai dengan bulan Desember 2019. Dengan demikian realisasi penyelesaian piutang sampai dengan Desember 2019 sebesar 99,65% dari target sebesar 90,3%, dengan capaian IKU 120% (hijau).

Rincian piutang yang terbit Januari s.d. Desember 2019 dan saldo akhir piutang lancar per 31 Desember 2019 tidak termasuk piutang terbit November s.d. Desember 2019 yang belum dilunasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Rincian Terbit Piutang Lancar Januari s.d. Desember 2019

No	Jenis Dokumen	Nilai Tagihan	%
1	SPTNP	313.823.941.000	54,44%
2	PIB Berkala	197.569.893.000	34,27%
3	SPPBMCP	30.346.160.160	5,26%
4	SPKTNP	24.704.423.000	4,29%
5	SPP	3.931.499.878	0,68%
6	Kep Keberatan Impor	3.269.971.000	0,57%
7	SPSA	1.730.432.000	0,30%
8	PIBK PJT	530.109.000	0,09%
9	SPKPBK	463.206.000	0,08%
10	SPPBK	124.080.197	0,02%
Total		576.493.715.235	100,00%

Berikut ini merupakan rincian Saldo Akhir Piutang Lancar per 31 Desember 2019 tidak termasuk piutang yang terbit November-Desember 2019:

Tabel 3.12
Saldo Akhir Piutang Lancar per 31 Desember 2019

No	Jenis Dokumen	Nilai Tagihan	%
1	SPP	1.169.799.000	57,13%
2	SPTNP	403.381.000	19,70%
3	SPKTNP	277.408.000	13,55%
4	Kep Keberatan Impor	132.642.000	6,48%
5	SPPBMCP	59.478.000	2,90%
6	SPSA	5.000.000	0,24%
Total		2.047.708.000	100,00%

Dalam upaya mencapai target penyelesaian piutang ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2019. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Pembayaran tagihan melebihi jatuh tempo pembayaran.
- Wajib bayar tidak ditemukan/sudah tidak berada di alamat yang terdaftar di Regina
- Kesulitan mendapatkan data-data wajib bayar karena informasi pada Regina tidak lengkap.
- Wajib bayar mengalami kesulitan keuangan.

KPPCB TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Melakukan monitoring terhadap status dokumen piutang secara berkala.
- Melakukan pendekatan terhadap pengurus/PPJK apabila Penanggung BM dan/atau Cukai tidak ditemukan.
- Memberikan keringanan kepada wajib bayar yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar tagihan dengan cara diangsur/dicicil.

5b-CP Persentase kepatuhan importir

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang. Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur atas importir yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan hardcopy dokumen, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan hardcopy dokumen dan PKB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
 - hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- Terhitung sejak SPJK dan SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
 - hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- Terhitung sejak ditetapkan SPJM

3. Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan SPJM).

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya untuk penyerahan hardcopy dan/atau PKB. Importir dinyatakan patuh apabila:

- Pada kuartal I, 15% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh;
- Pada kuartal II, 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh;
- Pada kuartal III, 50% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh; dan
- Pada kuartal IV, 70% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Importir SPJK dan SPJM yang patuh}}{\text{Jumlah Importir SPJK dan SPJM}} \times 100\%$

IKU Persentase Kepatuhan Importir merupakan IKU baru, yang di-cascade/diturunkan dari IKU Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yang ditetapkan dengan target 80%. IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. Penghitungan IKU ini dilaksanakan oleh Direktorat IKC yang disampaikan ke KPPBC setiap awal bulan tiga bulan sekali (triwulan). Realisasi Kepatuhan Importir dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 adalah 93,14% sehingga capaiannya sebesar 116,43% (hijau).

Berikut adalah rincian penghitungan capaian IKU Kepatuhan Importir:

Tabel 3.13
Penghitungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2019

Komponen Kepatuhan	Σ Importir yang patuh	Σ Importir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	1484	1589	93,39%
Kepatuhan penyerahan PKB	1115	1533	72,73%
Kepatuhan penyerahan DNP	701	826	84,87%

Capaian IKU			
Kepatuhan Importir	1480	1589	93,14%

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen kepatuhan tertinggi ada pada kepatuhan penyerahan *hardcopy*, yaitu 93,39%. Hal tersebut dikarenakan importir akan terblokir secara sistem (Ceisa) terhadap pelayanan berikutnya apabila terlambat menyerahkan *hardcopy*.

Kemudian untuk komponen kepatuhan terendah ada pada kepatuhan penyerahan PKB, yaitu 72,73%. Hal tersebut terjadi dikarenakan importir melalui pengurus barangnya saat melakukan penyerahan dokumen PKB belum melengkapi dengan kesiapan kontainer pada *Container Yard* di TPKS, sehingga belum bisa dilakukan perekaman. Untuk meminimalisir hal tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas melalui Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai yang membawahi Impor telah menghimbau kepada importir untuk memastikan kelengkapan dokumen saat akan menyerahkan PKB. Juga telah dilakukan pengecekan dokumen PKB melalui aplikasi Ceisa dan Webaces TPKS.

Untuk komponen kepatuhan penyerahan DNP juga belum terlalu baik, yaitu 84,87% meskipun sudah di atas target yang ditetapkan yaitu 80%. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi atau *reward* kepada pengguna jasa yang patuh atau tidak patuh menyerahkan DNP. Untuk mengatasi hal tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas telah menghimbau kepada pengguna jasa agar segera menyampaikan DNP secara tepat waktu. Untuk rencana aksi ke depan dapat melaksanakan monitoring INP oleh PFPD dan melaksanakan *Focus Discussion Group* (FGD) tentang syarat-syarat DNP guna penetapan Nilai Pabean.

SS-6 PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA

Peningkatan Pelayanan Prima merupakan salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Industrial Assistance*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena selain melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC juga harus bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanannya. Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna layanan (customer) dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan (customer) bidang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan (customer) dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan.

Indeks Capaian sasaran strategis Peningkatan Pelayanan Prima tahun 2019 sebesar 116,84% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai.

6a-CP Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai

IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang Kepabeanan dan Cukai kepada para pengguna jasa sudah memenuhi standar waktu layanan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor tentang Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas. Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Capaian untuk setiap layanan dihitung dengan formula:

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata} - \text{rata waktu penyelesaian}}{\text{rata} - \text{rata waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Catatan:

1. Apabila capaian parameter " $\sum \text{dokumen tepat waktu} / \sum \text{dokumen}$ " adalah 100%, maka dapat dihitung maksimum 120% untuk unsur perhitungan pertama (sebelum dikalikan bobot 70%).
2. Jika capaian parameter " $\sum \text{dokumen tepat waktu} / \sum \text{dokumen}$ " < 100%, maka capaian akhir IKU ini adalah maksimum 100%.
3. Rata-rata waktu penyelesaian yang dapat dicapai maksimum 120%.

Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas telah ditetapkan terakhir dengan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas nomor KEP-565/WBC.10/KPP.MP.01/2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor KEP-118/WBC.09/KPP.MP.01/2013 tentang Janji Layanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Keputusan tersebut berisi daftar jenis layanan, standar waktu pelayanan dan biaya layanan.

Untuk tahun 2019, KPPBC TMP Tanjung Emas masih memiliki 27 (dua puluh tujuh) janji layanan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.14
Daftar Janji Layanan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	BIAYA LAYANAN
1	Penutupan Pos BC 1.1 dengan Menggunakan Dokumen BC 2.3	5 menit	Mulai proses penutupan pos BC 1.1 pada Aplikasi CEISA	SPPB-TPB yang telah diberi catatan penutupan pos BC 1.1 diserahkan kembali	Tidak dipungut biaya
2	Perbaikan (<i>Redress</i>) Manifes Selain Perubahan <i>Consignee</i>	90 menit	Permohonan diterima dengan lengkap	Data perbaikan BC 1.1 selesai direkam di Aplikasi CEISA	Tidak dipungut biaya
3	<i>Analyzing Point</i> Impor	15 menit	Berkas diterima dengan lengkap	Respons penjaluran diterbitkan	Tidak dipungut biaya
4	<i>Analyzing Point</i> Ekspor	15 menit	Berkas diterima dengan lengkap	Respons Persetujuan Ekspor diterbitkan	Tidak dipungut biaya
5	Pemeriksaan Fisik Barang Impor (PIB) Jalur Merah	2 jam	Pemeriksaan fisik selesai dilakukan	LHP selesai direkam di Aplikasi CEISA	Tidak dipungut biaya
6	Pemotongan Kuota Fasilitas Kepabeanan	30 menit	Kartu Kendali dan Berkas diterima dengan lengkap	Kartu Kendali yang telah selesai pemotongan kuota dan Berkas diserahkan kembali	Tidak dipungut biaya
7	Pemotongan Kuota Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP)	30 menit	Laporan Realisasi Impor dan Berkas diterima dengan lengkap	Laporan Realisasi Impor yang telah diparaf dan Berkas diserahkan kembali	Tidak dipungut biaya
8	Pemberian Izin Impor Kembali Barang yang Telah Diekspor (Reimpor)	2 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Keputusan pemberian izin reimpor diterbitkan	Tidak dipungut biaya
9	Pemberian Izin Impor Sementara	2 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Keputusan pemberian izin impor sementara diterbitkan	Tidak dipungut biaya
10	Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA	2 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	BCF 2.6 A diterbitkan	Tidak dipungut biaya
11	Pengembalian Barang Contoh	1 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Barang diserahkan contoh	Tidak dipungut biaya
12	Pemberian Izin Impor dengan Fasilitas ATA-Carnet	1 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	SPPB diterbitkan	Tidak dipungut biaya
13	Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (<i>Pre-Notification</i>)	1 hari	Berkas diterima dengan lengkap	Surat izin <i>Pre-Notification</i> diterbitkan	Tidak dipungut biaya

LAPORAN KINERJA 2019

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	BIAYA LAYANAN
14	Pembatalan BCF 1.5 (Status Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai)	1 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Persetujuan pembatalan BCF 1.5 diterbitkan	Tidak dipungut biaya
15	Impor Barang yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera (<i>Rush Handling</i>)	2 jam	Berkas diterima dengan lengkap	SPPB diterbitkan	Tidak dipungut biaya
16	Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang yang Tiba Bersama Penumpang	5 menit (jalur hijau) 2 jam (jalur merah)	<i>Customs Declaration</i> diterima	Persetujuan pengeluaran barang	Tidak dipungut biaya
17	Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)	3 hari	Permohonan diterima dengan lengkap dan barang siap untuk dilakukan pemeriksaan fisik	SPPB diterbitkan	Tidak dipungut biaya
18	Impor Barang melalui Kiriman Pos	2 hari	Barang Kiriman diterima dari Kantor Pos	Respons SPPBMCP/NPD/SPBL/Respons lain diterbitkan	Tidak dipungut biaya
19	Pembatalan PEB	1 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Pembatalan PEB disetujui pada Aplikasi CEISA	Tidak dipungut biaya
20	Pembetulan Data PEB	60 menit	Mulai proses pembetulan data PEB pada Aplikasi CEISA	Respons Terima Pembetulan PEB diterbitkan	Tidak dipungut biaya
21	Pemberian Izin Ekspor Barang yang Akan Diimpor Kembali (Ekspor Sementara)	2 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Keputusan pemberian izin Ekspor Sementara diterbitkan	Tidak dipungut biaya
22	Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Kuning	2 hari	Berkas PIB diterima lengkap	Respons SPPB/SPTNP/NPBL/IN P/ Konfirmasi/Respons lain diterbitkan	Tidak dipungut biaya
23	Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Merah	2 hari	Pemeriksaan fisik selesai direkam di Aplikasi CEISA	Respons SPPB/SPTNP/NPBL/IN P/ Konfirmasi/Respons lain diterbitkan	Tidak dipungut biaya
24	Penerusan Permohonan Keberatan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai	5 hari	Tanda terima permohonan keberatan	Permohonan diteruskan ke Kantor Wilayah	Tidak dipungut biaya
25	Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga	30 hari	Berkas diterima dengan lengkap dan benar	SKPBM dan SPMKBM diterbitkan	Tidak dipungut biaya
26	Permohonan Menjadi Anggota EDI Kepabeanan	1 hari	Permohonan diterima dengan lengkap	Surat Pengantar Bea dan Cukai (SPBC) diterbitkan	Tidak dipungut biaya
27	Layanan Informasi, Konsultasi dan Bimbingan Kepatuhan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	60 menit	Permintaan layanan informasi diterima	Informasi diberikan	Tidak dipungut biaya

IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang Kepabeanaan dan Cukai kepada para pengguna jasa sudah sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP) layanan unggulan. IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 100%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *high*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari laporan capaian janji layanan dari masing-masing unit penanggung jawab. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugas dan fungsi unitnya masing-masing.

Dari target IKU sebesar 100%, selama tahun 2019 tercapai sebesar 116,84% sehingga berdasarkan BSC indeks capaiannya adalah 116,84% (hijau). Berikut adalah perbandingan data capaian IKU dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan
Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2017 s.d. 2019

No	Periode	Target	2017	2018	2019
1	Januari	100%	120%	117,51%	116,67%
2	Februari	100%	113,23%	114,29%	116,52%
3	Maret	100%	119,10%	116,52%	116,67%
4	April	100%	119,30%	117,00%	116,92%
5	Mei	100%	119,13%	116,54%	116,92%
6	Juni	100%	119,03%	116,36%	116,80%
7	Juli	100%	118,80%	116,39%	116,92%
8	Agustus	100%	118,02%	116,42%	116,92%
9	September	100%	117,99%	116,45%	117,04%
10	Oktober	100%	117,89%	116,47%	116,80%
11	November	100%	117,89%	116,46%	116,92%
12	Desember	100%	119,82%	116,47%	116,92%
Tahunan		100%	119,82%	116,47%	116,84%

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja capaian janji layanan apabila dibandingkan dengan tahun 2017, 2018 dan 2019 bersifat fluktuatif. Namun janji layanan di tahun 2019 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun secara umum capaian IKU ini sudah baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2019. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Petugas PDAD kesulitan untuk melakukan konfirmasi terkait permohonan perubahan dan pembatalan PIB yang diajukan.
- Dokumen permohonan keberatan dan pengembalian sudah diterima petugas OA tetapi blm diberikan tanda terima permohonan.
- Sering terjadi gangguan pada aplikasi Siap Tanding.

- d. Pada pelayanan di bandara, saat proses pengisian BC 2.2 (Customs Declaration) bagi penumpang lebih lambat apabila terdapat penumpang yang tidak bisa berbahasa Inggris atau Indonesia.
- e. Jaringan internet yang tidak lancar dan stabil untuk pelayanan di Kantor Pos Lalu Bea karena memakai *provider* Speedy dengan *bandwidth* yang rendah.

KPPCB TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan petugas penerimaan surat masuk (OA) untuk memastikan permohonan yang diajukan sudah dilengkapi dengan *contact person* yang bisa dihubungi.
- b. Berkoordinasi dengan petugas penerimaan surat masuk (OA) untuk tidak menerima dokumen jika belum ada checklist kelengkapan dokumen keberatan dan pengembalian.
- c. Melakukan koordinasi dengan Direktorat IKC apabila terjadi gangguan dan kendala pada aplikasi Siap Tanding.
- d. Mengusulkan kepada pihak Kantor Pos Lalu Bea untuk memasang jaringan yang lebih stabil dan berkoordinasi dengan Seksi PDAD untuk pemasangan jaringan mandiri apabila dimungkinkan.

SS-7 EDUKASI DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dari edukasi maupun komunikasi terkait *update* maupun perubahan pada peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Edukasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh DJBC kepada pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) melalui pelatihan/sosialisasi/workshop. Adapun capaian sasaran strategis “Peningkatan efektivitas dan komunikasi” pada tahun 2019 sebesar 116,58% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu IKU “Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi”.

7a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks Efektivitas Kegiatan Sosialisasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) pada pelatihan/sosialisasi/workshop yang diselenggarakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas dalam hal pemahaman substansi/materi. Variabel yang diukur adalah:

- a. Acara (bobot 20%),
- b. Materi (bobot 30%) dan
- c. Narasumber (bobot 50%).

Pada tahun 2019 KPPBC TMP Tanjung Emas minimal melaksanakan kegiatan sebanyak 20 kali. Pengukuran efektivitas edukasi dan komunikasi dilakukan berdasarkan standardisasi kuesioner yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Keterangan
$0 \leq x < 40$	Tidak efektif
$40 \leq x < 60$	Kurang efektif
$60 \leq x < 75$	Cukup efektif
$75 \leq x < 90$	Efektif
$90 \leq x \leq 100$	Sangat efektif

IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas. IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU ini adalah 80 (indeks 100), polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Komunikasi. IKU ini di-*cascading* kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Pada tahun 2019, capaian KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 93,26 (kategori “sangat efektif”) naik 0,11 jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 93,15, sehingga indeks capaiannya adalah 116,58% (hijau).

Berikut adalah perbandingan data capaian IKU dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
Tahun 2017 s.d. 2019

No	Periode	Target	2017	2018	2019
1	Triwulan I	80%	83,96	90,01	91,18
2	Triwulan II	80%	84,10	93,31	92,18
3	Triwulan III	80%	84,04	93,11	92,06
4	Triwulan IV	80%	84,57	93,15	93,26
Tahunan		80%	84,57	93,15	93,26

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi apabila dibandingkan dengan tahun 2017, 2018 dan 2019 selalu mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas.

LAPORAN KINERJA 2019

Meskipun secara umum capaian IKU ini sudah baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2019. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Tantangan untuk selalu membuat acara menarik, sehingga peserta dapat memahami atas materi yang disampaikan.
- Di dalam pertanyaan yang ada di kuesioner ada yang memberikan jawaban berkebalikan, sehingga ada potensi menjawab kurang teliti yang menyebabkan kuesioner tidak valid.

KPPCB TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Acara sosialisasi rutin yang dilaksanakan dikemas dengan menarik.
- Memberikan materi sesuai dengan audien.
- Memberikan waktu yang cukup kepada audien untuk berdiskusi.
- Memberikan arahan cara mengisi kuissoner dengan benar, sehingga menghindari adanya kuissoner yang tidak valid.
- Mempermudah pengisian kuissoner menggunakan googleform sehingga tidak harus mencetak kertas untuk pengisian kuissoner.

Berikut ini adalah daftar pelaksanaan sosialisasi selama tahun 2019:

Tabel 3.17
Pelaksanaan Sosialisasi kepada Masyarakat Tahun 2019

No	Sosialisasi	Lokasi	Waktu	Nilai
1	Kunjungan Polines: Peran Bea Cukai terhadap Perkembangan UMKM-K	KPPBC TMP Tanjung Emas	28/01/2019	90,80
2	Sosialisasi Free Trade Agreement	KPPBC TMP Tanjung Emas	27/02/2019	91,20
3	Sosialisasi Ekspor CPO	KPPBC TMP Tanjung Emas	12/03/2019	90,43
4	Sosialisasi MITA Kepabeanan	KPPBC TMP Tanjung Emas	12/03/2019	91,21
5	Kelas Inspirasi : Kenalkan Bea Cukai Sejak Dini	KPPBC TMP Tanjung Emas	13/03/2019	92,27
6	Kunjungan SMK 1 Kendal : Sosialisasi Pengenalan Bea Cukai	KPPBC TMP Tanjung Emas	01/04/2019	90,88
7	Sosialisasi Pos Lintas Batas ke TNI Yonif Mekanis Raider 411	Mayonif Mekanis Raider 411	08/04/2019	95,37
8	Kunjungan IAIN Surakarta : Sosialisasi Pengenalan Bea Cukai	KPPBC TMP Tanjung Emas	02/05/2019	91,78
9	Sosialisasi Kepabeanan dan Cukai : PT. Phapros Tbk.	PT. Phapros Tbk.	19/06/2019	94,11

No	Sosialisasi	Lokasi	Waktu	Nilai
10	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Siswa Kursus Perwira Penyidik Tindak Pidana Tertentu di Laut (Suspaidikla) TNI AL 2019	KPPBC TMP Tanjung Emas	24/06/2019	92,73
11	Coffee Morning dan Sosialisasi Pengguna Jasa Kepabeanan	KPPBC TMP Tanjung Emas	25/06/2019	93,17
12	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Mahasiswa POLINES	PT. Phapros Tbk.	04/07/2019	91,85
13	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Mahasiswa LP3i	KPPBC TMP Tanjung Emas	16/07/2019	92,37
14	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Mahasiswa UNISBANK	KPPBC TMP Tanjung Emas	22/07/2019	93,30
15	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Mahasiswa Administrasi Bisnis POLINES	KPPBC TMP Tanjung Emas	29/07/2019	91,21
16	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Mahasiswa Hubungan Internasional UNDIP	Universitas Diponegoro	06/08/2019	92,15
17	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada PPTKIS PT. Pelita Karya Juhari	PT. Pelita Karya Juhari	14/08/2019	92,05
18	Sosialisasi Free Trade Agreement	KPPBC TMP Tanjung Emas	03/09/2019	91,95
19	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Mahasiswa Fakultas Hukum UB	KPPBC TMP Tanjung Emas	06/09/2019	90,35
20	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Mahasiswa UNNES	KPPBC TMP Tanjung Emas	15/10/2019	96,14
21	Sosialisasi Peraturan Kepabean dan Cukai Terbaru kepada Pengguna Jasa	KPPBC TMP Tanjung Emas	17/10/2019	95,11
22	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Mahasiswa APN Surakarta	KPPBC TMP Tanjung Emas	05/11/2019	99,03
23	Sosialisasi Kepada Eksportir terkait Ekspor Produk Industri Kehutanan	KPPBC TMP Tanjung Emas	25/11/2019	99,17
24	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Taruna STIMART AMNI	KPPBC TMP Tanjung Emas	26/11/2019	95,13
25	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Taruna STIMART AMNI 2	KPPBC TMP Tanjung Emas	27/11/2019	96,72
26	Sosialisasi Kepabean dan Cukai kepada Taruna Polimarin Semarang	KPPBC TMP Tanjung Emas	20/12/2019	94,15

SS-8 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan DJBC dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif. Capaian Sasaran Strategis “Peningkatan efektivitas Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai” pada tahun 2019 sebesar 108,77% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai
2. Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut

8a-CP Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai

Kegiatan penindakan merupakan tindak lanjut temuan indikasi pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang teridentifikasi dalam proses lalu lintas barang dan peredaran barang kena cukai. Atas temuan tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) untuk menindak dan membuktikan indikasi pelanggaran yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Pelanggaran kepabeanaan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang berhasil ditindak KPPBC TMP Tanjung Emas selama tahun 2019. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai sebagai berikut :

1. Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 huruf a sampai dengan h Perdirjen Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang dapat berupa :
 - a. pengenaan sanksi andministrasi berupa denda,
 - b. penyidikan,
 - c. penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN),
 - d. pemblokiran,
 - e. rekomendasi audit,
 - f. reekspor,
 - g. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai,
 - h. pelimpahan ke Instansi terkait;
2. Pembekuan NPPBKC;
3. Pencabutan NPPBKC;
4. Pemusnahan Barang Kena Cukai.
5. Pembatalan Ekspor
6. Penyerahan Izin dari Instansi Terkait
7. Perubahan Tarif Pos Tarif

Tindak lanjut temuan yang dihitung masuk pada pelaporan capaian IKU terbatas pada 14 (empat belas) tindak lanjut di atas. Apabila satu kegiatan penindakan di bidang kepabeanaan dan cukai ternyata menghasilkan lebih dari satu jenis tindak lanjut, maka pada pelaporan capaian IKU hanya dihitung sebagai satu tindak lanjut saja.

Tujuan dari IKU “Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai” untuk mengukur tingkat keberhasilan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai. Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SBP terbit tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah SBP yang terbit tahun berjalan}} \times 100\%$$

IKU ini merupakan IKU *cascading* dengan target IKU ini adalah 92%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari data Laporan temuan pelanggaran dari Seksi Penindakan dan Penyidikan. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kasi Penindakan dan Penyidikan.

SBP yang telah diterbitkan selama tahun 2019 sebanyak 472 dokumen. Dari jumlah tersebut 439 (93,01%) SBP telah ditindaklanjuti dari target sebesar 92% sehingga indeks capaian IKU-nya adalah 101,10% (hijau).

Jumlah temuan pelanggaran pada tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Berikut ini rekapitulasi penerbitan SBP Tahun 2012 – 2019:

Tabel 3.18
Rekapitulasi Penerbitan SBP Tahun 2012 – 2019

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SBP diterbitkan	64	135	162	538	402	998	451	472
SBP yang ditindaklanjuti	63	123	157	529	379	976	443	439
% SBP yang ditindaklanjuti	98.44%	91.11%	96.91%	98.33%	94.28%	97.79%	98,22%	93,01%

Peningkatan pada tahun 2017 karena adanya program penertiban impor berisiko tinggi yang dideklarasikan pada tanggal 12 Juli 2017. Program PIBT menyebabkan adanya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas dan berdampak pada meningkatnya jumlah SBP yang diterbitkan.

8b-CP Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan. Patroli laut yang diperhitungkan adalah kegiatan patroli laut dalam konteks patroli laut bersama, patroli laut terpadu, dan patroli laut terkoordinasi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien, serta mengukur optimalisasi

LAPORAN KINERJA 2019

pemanfaatan kapal patroli dan pelaksanaan patroli laut dalam mendukung tugas pengawasan. Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Komponen I	Komponen II	Komponen III	Komponen IV
$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} \times 65\% +$	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% +$	$\frac{\sum \text{Patroli Laut yang menghasilkan penindakan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% +$	$\frac{\sum \text{Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$
Dalam hal pelaksanaan patroli laut melebihi jumlah rencana patroli laut, maka nilai komponen penghitungan "$\sum \text{pelaksanaan patroli laut} / \sum \text{rencana patroli laut}$" maksimal adalah 100%			

Keterangan dan Contoh perhitungan IKU:

Capaian IKU dihitung dengan menjumlahkan 4 komponen penghitungan, dengan bobot komponen I: II: III: IV = 65% : 10% : 10% : 15%.

a. Komponen I

- Nilai komponen I adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan patroli laut dibanding dengan jumlah rencana patroli laut.
- Jumlah rencana patroli laut merupakan jumlah yang ditentukan oleh Direktorat P2.
- Jumlah perencanaan patroli laut dapat berubah apabila ada Nota Dinas penyampaian perubahan dari Direktorat P2 pada tahun berjalan, selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.
- Dalam hal jumlah pelaksanaan patroli laut melebihi jumlah rencana patroli laut, maka nilai komponen I maksimal adalah 100%. Misalnya, dengan jumlah rencana patroli laut 10 kali, Unit A telah melaksanakan patroli sebanyak 13 kali. Maka nilai komponen I adalah $= 10/10 = 100\%$ (jumlah pelaksanaan dianggap 10 kali).

b. Komponen II

- Nilai komponen II adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dengan jumlah pelaksanaan patroli laut.

c. Komponen III

- Nilai komponen III adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan dengan jumlah pelaksanaan patroli laut.

d. Komponen IV

- Nilai komponen IV adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targetting dengan jumlah pelaksanaan patroli laut.

IKU ini merupakan IKU *cascading* dengan target IKU ini adalah 70%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari data SPP (Surat Perintah Patroli) dan SBP (Surat Bukti Penindakan). IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kasi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2019, KPPBC TMP Tanjung Emas merencanakan kegiatan patroli laut sebanyak 12 kali. Namun pada pertengahan tahun berjalan, kapal patroli yang akan dipakai untuk pelaksanaan patroli laut mengalami kerusakan. KPPBC TMP Tanjung Emas kemudian

berkoordinasi dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan untuk meminta penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan patroli dan disetujui dengan rencana jumlah pelaksanaan kegiatan patroli laut sebanyak 10 kali. SPP yang telah diterbitkan selama tahun 2019 sebanyak 11 dokumen dan dari jumlah tersebut seluruhnya melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut. Dari 11 kegiatan patroli, tidak menghasilkan penindakan. Capaian persentase efektivitasnya mencapai 81,5% melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 70%. Realisasi kinerja persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut sebesar 116,43% (hijau). Berikut ini rekapitulasi penerbitan Surat Perintah Berlayar Tahun 2019:

Tabel 3.19
Rekapitulasi Penerbitan Surat Perintah Berlayar Tahun 2019

No.	Bulan	Pelaksanaan Patla	Rencana Patla	Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	Persentase Pelaksanaan Patla x 65%	Persentase Pemeriksaan sarana pengangkut x 10%	Persentase patroli laut yang Menghasilkan penindakan x 10%	Persentase penindakan berdasarkan targeting x 15%	Capaian IKU s.d bulan
1	Januari	1	10	-	6,5%	-	-	-	6,5%
2	Februari	2		2	13%	10%	-	-	23%
3	Maret	4		4	26%	10%	-	-	36%
4	April	5		5	32,5%	10%	-	-	42,5%
5	Mei	6		6	39%	10%	-	-	49%
6	Juni	6		6	39%	10%	-	-	49%
7	Juli	6		6	39%	10%	-	-	49%
8	Agustus	6		6	39%	10%	-	-	49%
9	September	8		8	52%	10%	-	-	62%
10	Oktober	10		10	65%	10%	-	-	75%
11	November	10		10	65%	10%	-	-	75%
12	Desember	11		11	71,5%	10%	-	-	81,5%

SS-9 PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL

Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Capaian Sasaran Strategis Pengendalian Mutu yang optimal pada tahun 2019 sebesar 119,21% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 3 (tiga) IKU yaitu:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional
2. Persentase efektifitas implementasi manajemen risiko
3. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

9a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu hasil audit atas kinerja DJBC.

Saldo Rekomendasi temuan adalah :

- a. Jumlah rekomendasi yang diterima KPPBC TMP Tanjung Emas selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2019, ditambah;
- b. Saldo rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses (belum selesai) dan/atau belum ditindaklanjuti yang ada pada Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Audit (LHA) dan Berita Acara Pembahasan Bersama yang diadministrasikan oleh Dit. Kepatuhan Internal berkoordinasi dengan APF.

Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Kepatuhan Internal selaku koordinator tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima oleh DJBC selain menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima untuk unit Dit. Kepatuhan Internal itu sendiri.
- b. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima.
- c. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada KPPBC dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
- d. KPPBC, BPIB, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu belum ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti namun belum tuntas serta telah ditindaklanjuti dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF. Tindak lanjut yang diperhitungkan adalah tindak lanjut dari unit yang memiliki saldo rekomendasi APF pada tahun berjalan.

Kriteria telah ditindaklanjuti untuk temuan BPK dan BPKP adalah apabila KPPBC TMP Tanjung Emas telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada Dit. Kepatuhan Internal dalam bentuk Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional.

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP adalah apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF atau apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah diunggah pada modul Team Central, adalah sebagai berikut:

Simbol	Status	Capaian	Keterangan
	Pending	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti
	Started	0%	Tindak lanjut hanya dilakukan melalui menu update status
	Implemented PCA	0%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu implemented, namun final approver belum approve tindak lanjut owner
	Implemented FCA	75%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu implemented dan final approver sudah approve tindak lanjut owner, untuk kemudian diajukan ke auditor
	Started	75%	Tindak lanjut telah diajukan ke auditor namun dikembalikan (di-reject) ke owner dengan memberikan catatan untuk melengkapi dokumen pendukung lainnya
	Audit - Approved	75%	Rekomendasi telah disetujui oleh ketua tim auditor dan statusnya menunggu keputusan lebih lanjut dari Pengendali Teknis
	Closed Verified	100%	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan statusnya telah di-closed oleh Pengendali Teknis
	Closed NLA	n/a	Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku oleh auditor dan tidak dihitung menjadi saldo

LHP dan LAP Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang belum diupload pada aplikasi TeamCentral, kriteria penghitungan capaian IKU-nya dijabarkan sebagai berikut :

- 0% : Jika rekomendasi belum ditindaklanjuti
- 75% : Jika telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi Itjen Kemenkeu kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker
- 100% : Jika rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh auditor Itjen

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember 2019 dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan, terhadap rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam capaian IKU tahun berjalan. Sedangkan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti maupun telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas, maka atas rekomendasi tersebut akan dimasukkan ke saldo tahun berikutnya.

Melalui kegiatan evaluasi kinerja tersebut diharapkan pimpinan unit dapat mengetahui secara dini capaian setiap IKU sehingga dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung tercapainya kinerja kantor yang lebih baik.

LAPORAN KINERJA 2019

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{(0.75 \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas}) + (1 \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas})}{\text{Jumlah Saldo Rekomendasi APF tahun berjalan}} \times 100\%$$

IKU ini merupakan IKU *cascading* dengan target IKU ini adalah 76%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari data Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada APF, Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada Direktorat Kepatuhan Internal, Surat Hasil Penilaian Tindak Lanjut dari APF, Berita Acara pembahasan Tindak Lanjut, aplikasi team central. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kasi Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2019, saldo awal rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang harus ditindaklanjuti oleh KPPBC TMP Tanjung Emas berjumlah 6 (enam) rekomendasi. Kemudian terdapat 1 rekomendasi lagi yang harus ditindaklanjuti atas hasil penilaian pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi oleh Auditor Utama BPK RI. 6 rekomendasi sudah ditindaklanjuti dan telah tuntas, serta 1 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti namun belum tuntas, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) rekomendasi dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada Surat Tugas Tim Inspektorat Jenderal nomor ST-1045.1/IJ/2017 berupa rekomendasi implementasi sistem aplikasi TPS Online pada kawasan pabean telah tuntas.
- 5 (lima) rekomendasi dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada LAP-81/IJ.3/2018 berupa rekomendasi penelitian kembali penetapan PIB yang menjadi temuan Tim Inspektorat Jenderal dan menindaklanjuti hasilnya dengan mengusulkan Penetapan ulang kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah tuntas.
- 1 (satu) rekomendasi hasil audit BPK RI pada LHP nomor 76/LHP/XV/12/2013 berupa penagihan tunggakan utang telah ditindaklanjuti dan atas rekomendasi untuk KPPBC Tanjung Emas masih kurang data berupa matriks keberatan yang diterima dan ditolak, beserta nilai tagihan masing-masing, disertai dengan nilai penyetoran keberatan yang ditolak tersebut, sesuai nilai di lampiran LHP.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 95,83% dari target sebesar 76%, sehingga indeks capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 120% (hijau).

9b-N Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi pelaksanaan rapat MR, penyampaian laporan, realisasi mitigasi, dan TkPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

Adapun untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula Unit Eselon II dan III di lingkungan DJBC :

- A. pelaksanaan rapat MR = $\left(\frac{\sum \text{nilai pelaksanaan rapat MR}}{5} \right) \times 100\%$
- B. Penyampaian Laporan tepat waktu = $\left(\frac{\text{Rata-rata indeks penyampaian laporan MR}}{4} \right) \times 100\%$
- C. % Realisasi mitigasi = $\left(\frac{\sum \text{realisasi mitigasi risiko yang dijalankan oleh UPR}}{\sum \text{Rencana Mitigasi}} \right) \times 100\%$
- D. TkPMR (Kemandirian) = Nilai Capaian TkPMR
- IKU Efektivitas Implementasi MR = 15% (ΣA) + 15% (ΣB) + 50% (ΣC) + 20% (ΣD)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko.

Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

Tingkat kematangan / kemandirian penerapan manajemen risiko (TKPMR) adalah kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapai tujuannya dan bagi penyempurnaan sistem manajemen risiko. TKPMR berfungsi menilai kualitas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara pelaksanaan TKPMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari laporan manajemen risiko Unit Pemilik Risiko dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*.

Capaian IKU “Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko DJBC” KPPBC TMP Tanjung Emas adalah:

- Pelaksanaan Rapat MR :
 $5/5 \times 15\% = 15\%$
- Penyampaian Laporan Tepat Waktu:
 $4/4 \times 15\% = 15\%$
- Persentase Realisasi Mitigasi Risiko:
 $((100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/5) \times 50\% = 50\%$
- TkPMR (Kemandirian):
 $20\% \times 94,03 = 18,80\%$

e. Realisasi IKU = $15\% + 15\% + 50\% + 16,03 = 98,80\%$

Dari target IKU sebesar 75%, capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 98,80% sehingga indeks capaiannya adalah 120% (hijau).

9c-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU
- Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pemantauan pengendalian utama
- Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas yang terkait dengan penegakan kepatuhan internal/disiplin merupakan upaya pengawasan (monitoring) dan penguatan kepatuhan internal yang berlandaskan pada manajemen risiko yang dilaksanakan dengan harapan dapat menimbulkan efek penangkal (deterrent effect) yang pada akhirnya diharapkan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas diterbitkan setelah dilakukan kegiatan PKPT, antara lain: pengawasan (monitoring), spot check (pemeriksaan mendadak) dan penguatan (konsolidasi) kepatuhan internal yang dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko. Rekomendasi diterbitkan atas kegiatan PKPT sepanjang tahun 2019. Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari Unit Kerja tempat dilaksanakannya PKPT telah disampaikan kepada Dit. KI dengan surat kepala Unit Kerja terkait.

Pengelolaan kinerja organisasi yang optimal adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara optimal dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang valid untuk tercapainya tujuan organisasi. Evaluasi pengelolaan IKU dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan IKU di Lingkungan DJBC Rekomendasi tindak lanjut atas evaluasi pengelolaan IKU diterbitkan setelah dilakukan evaluasi pengelolaan IKU Kemenkeu-Two di lingkungan DJBC yang dilakukan pada tahun 2019. Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC. Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 30 oktober 2019 (non operasional) dan 1 Januari s.d. 30 November 2019 (operasional) ditambah saldo pengaduan tahun 2018 yang masih belum selesai diproses, ditambah pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan Desember 2019 dalam hal sudah selesai diproses pada tahun 2019. Jumlah pengaduan yang selesai diproses adalah jumlah pengaduan yang dianggap selesai diproses pada tahun 2019 dari pengaduan yang diterima.

Pemantauan pengendalian intern dilakukan pada masing-masing unit kerja dalam rangka menilai kualitas pengendalian intern. Pemantauan Pengendalian Intern dilakukan untuk membantu pimpinan satker dan pemilik pengendalian dalam meningkatkan penerapan pengendalian intern dan memastikan bahwa pengendalian utama dijalankan. Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern melalui Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dan Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR).

Kegiatan yang dipantau masing-masing Kantor menyesuaikan dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT). Hasil pemantauan pengendalian utama dituangkan dalam LHPPU. LHPPU (Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama) adalah Laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu; perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam periode tersebut; dan rekapitulasi tindak lanjut yang belum tuntas dari hasil pemantauan periode sebelumnya. Rekomendasi PPU adalah rekomendasi hasil pemantauan pengendalian utama atas kegiatan dalam unit masing-masing yang tertuang dalam LHPPU. Jumlah rekomendasi hasil PPU yang disampaikan adalah jumlah rekomendasi dalam LHPPU. Jumlah rekomendasi hasil PPU yang telah ditindaklanjuti adalah jumlah rekomendasi yang dinyatakan telah ditindaklanjuti oleh Kabid KI, dibuktikan dengan nota dinas dari unit terkait yang telah menindaklanjuti.

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) / Unit Kepatuhan Internal (UKI). Pada Satker penerima Rekomendasi Perhitungan penyelesaian Rekomendasi adalah dimulai pada saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat :

- a. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
- b. Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.

LAPORAN KINERJA 2019

Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima rekomendasi adalah dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:

- Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
- Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi / Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa : lebih tinggi / sesuai/ lebih rendah / tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi / lebih rendah / tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat.

Berdasarkan hal tersebut, Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Realisasi capaian IKU:

$$\frac{(A) + (B) + (C) + (D) + (E)}{n}$$

*Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah n=3.

1. Pengaduan Masyarakat (A)

$$\frac{\sum \text{Pengaduan operasional selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan operasional yang diterima}} \times 75\% + \frac{\sum \text{Pengaduan non operasional selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan non operasional yang diterima}} \times 25\%$$

- Cut off pengaduan operasional adalah pengaduan yang diterima s.d. Bulan November tahun berjalan
- Cut off pengaduan non operasional adalah pengaduan yang diterima s.d. Bulan Oktober tahun berjalan
- Apabila hanya terdapat salah satu jenis pengaduan yang diterima maka persentase menjadi 100%

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

$$\frac{\sum ((0,8 \times \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}) + (0,2 \times \text{rekomendasi ditindaklanjuti secara memadai}))}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

3. Pemantauan Pengendalian Utama (C)

Realisasi capaian IKU adalah:

$$A (15 \%) + B (85 \%)$$

A. Komponen perencanaan PPU :

- Pembuatan jadwal dan sumber daya pelaksana pemantauan (30%)
- Pelaksanaan pertemuan awal/entry meeting rencana kegiatan PPU (70%)

B. Komponen pelaksanaan PPU:

- Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan bobot 20%
- Konten laporan dengan bobot 60%, dihitung dari:

$$\frac{\sum (\% \text{rata} - \text{rata tingkat kepatuhan (LAT)} + \text{rata} - \text{rata proses bisnis yang efektif (LAT)})}{2}$$

- Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi bobot 20%

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

$$\frac{\sum ((0,75 \times \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}) + ((0,25 \times \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluae}))}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

- Pernyataan kualitas rekomendasi oleh evaluae dilakukan melalui survei yang disampaikan bersamaan pada saat penyampaian LHE

5. Investigasi Internal (E)

$$\frac{\sum ((0,5 \times \% \text{kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + ((0,5 \times \% \text{jangka waktu tindak lanjut}))}{2} + \frac{\sum ((0,5 \times \% \text{kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + ((0,5 \times \% \text{jangka waktu tindak lanjut}))}{2}$$

- Pengukuran terhadap rekomendasi hukdis

IKU ini merupakan IKU non-cascading dengan target IKU 85%, polarisasi maximize, tingkat kendali moderate, dan tingkat validitas proxy. Data capaian IKU diperoleh dari Laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat, Laporan pelaksanaan PKPT, Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama, Laporan hasil evaluasi pengelolaan kinerja, dan Investigasi internal dengan konsolidasi periode Take Last Known Value (TLKV).

Dari target IKU sebesar 90%, pada tahun 2019 tercapai sebesar 99,99% sehingga indeks capaiannya adalah 117,64% (hijau). Capaian tersebut berasal dari persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat sebesar 100% (9 pengaduan seluruhnya sudah ditindaklanjuti), rata-rata persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas sebesar 100% (4 rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti), persentase hasil PPU yang ditindaklanjuti sebesar 89,93% (komponen perencanaan PPU sebesar 15% ditambah komponen pelaksanaan PPU sebesar 74,93%), persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU sebesar 100% (13 rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti), dan Investigasi Internal dengan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi dan jangka waktu tindak lanjut sebesar 110%.

SS-10 SDM YANG KOMPETEN

SDM yang kompetitif adalah SDM yang mampu bersaing dengan indikator pegawai yang bersangkutan memiliki kemampuan kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Capaian Sasaran Strategis SDM yang kompetitif pada tahun 2019 sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai”.

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai yang diukur pada tahun 2019 adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Beberapa ketentuan pelaksanaan pelatihan yang diukur kinerjanya melalui IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing.

2. Tujuan pelatihan

- a. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan;
- b. Peningkatan pemahaman peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan/atau peraturan teknis lain yang menunjang tugas;
- c. Peningkatan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.

3. Tema yang dipilih sebagai materi pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi yang meliputi:

- a. Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- b. Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi (contoh: Pelatihan bahasa asing, pelatihan penggunaan alat scan narkotika/cukai, SLA, dll);

4. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal DJBC yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Narasumber dapat berasal dari unit masing-masing.

5. Ketentuan peserta pelatihan pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:
 - a. Khusus untuk Unit eselon II Kantor Pusat DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut dan unit vertikal terkait (jika tema materi merupakan peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai yang perlu diberikan kepada unit vertikal).
Contoh: Direktorat P2 mengadakan pelatihan deteksi pita cukai terkait operasi pasar BKC ilegal, maka dalam pelaksanaannya dapat mengundang Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Subdit Humas Direktorat KIAL, dan KPPBC yang terkait.
 - b. Pada Kanwil DJBC, meliputi Pejabat/pegawai pada unit Kanwil tersebut.
 - c. Pada KPPBC, PSO BC, dan BPIB, meliputi Pejabat/pegawai pada unit tersebut.
6. Kegiatan pelatihan pada tahun 2019 dilakukan sebanyak minimal 4 kali dalam setahun.
7. Pelaksanaan pelatihan wajib diikuti dengan pengujian soal Pre-Post Test terhadap peserta pelatihan.
8. Soal Pre-Post Test adalah soal yang sama, yang dibuat oleh Narasumber dan diisi oleh peserta pelatihan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan.
9. Soal yang digunakan dalam pengujian berupa soal benar/salah atau pilihan ganda berjumlah 10 soal.
10. Tujuan dari pengujian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan.
11. Pelaksanaan IKU ini tidak dapat beririsan dengan kegiatan P2KP (satu kegiatan tidak dapat diklaim sebagai capaian IKU ini dan capaian IKU P2KP).
12. Penilaian Peningkatan Kompetensi Pegawai
 - a. Persentase peningkatan kompetensi pegawai dihitung dari persentase peserta pelatihan yang mendapatkan predikat efektif (50%) dan persentase rata-rata nilai post-test peserta (50%).
 - b. Peserta pelatihan yang mendapatkan predikat yang efektif adalah peserta sebagai berikut:
 - 1) Peserta dengan nilai post-test ≥ 7 poin (lebih dari atau sama dengan 7 poin), atau
 - 2) Peserta dengan nilai post-test = 6 poin, namun nilai tersebut meningkat minimal 2 poin dari hasil pre-test yang dilaksanakan sebelum kegiatan, atau
 - 3) Peserta dengan nilai post test = 5 poin, namun nilai tersebut meningkat minimal 3 poin dari hasil pre-test yang dilaksanakan sebelum kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dihitung sebagai berikut:

$50\% \times \sum \text{Peserta pelatihan yg mendapat predikat efektif}$	+	$50\% \times \text{Rata-rata nilai post test}$
$\sum \text{Peserta pelatihan}$		10 poin

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 70%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari kompilasi penghitungan kuesioner. IKU ini di-*cascading* kepada Kepala Subbagian Umum. Iku ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC

Dari target IKU sebesar 70%, pada tahun 2019 tercapai sebesar 93,79% sehingga berdasarkan indeks capaiannya adalah 120% (hijau). Berikut adalah daftar pelaksanaan PPKP selama tahun 2019:

Tabel 3.20
Penyelenggaraan Kegiatan P2KP Tahun 2019

Tanggal	Materi	Persentase Peningkatan kompetensi
6 Februari 2019	Penegakan Disiplin di Lingkungan DJBC	89.59%
15 Maret	Barang Bawaan Penumpang	96.83%
25 Maret 2019	Peranan Freight Forwarding dalam Customs Clearance	95.43%
23 April 2019	Tata Naskah Dinas	95.43%
18 Juni 2019	Penagihan Bea Masuk dan Cukai	93.50%
10 Juli 2019	Penanggulangan Berita Negatif	98.70%
7 Agustus 2019	Internalisasi Pembangunan ZI Menuju WBK WBBM	95.90%
16 Agustus 2019	Penerapan Kantor Ramah Lingkungan	92.45%
5 Desember 2019	Pengarusutamaan Gender	98.00%
Tahunan		93,79%

P2KP dimaksudkan agar seluruh pegawai pada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat memperoleh penyegaran pengetahuan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai serta keterampilan di bidang lainnya yang terkait, sehingga seluruh pegawai pada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh pengguna layanan dan masyarakat, serta dapat melaksanakan pengawasan dengan efektif, sesuai dengan visi dan misi KPPBC TMP Tanjung Emas yang seiring dengan visi dan misi Direktorat Jenderal bea dan Cukai.

SS-11 ORGANISASI YANG *FIT FOR PURPOSE*

Organisasi yang *fit for purpose* adalah Organisasi yang *fit for purpose* adalah organisasi yang mampu memadai dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi DJBC. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Capaian Sasaran “Organisasi yang *fit for purpose*” pada tahun 2019 sebesar 110,19% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi”

11a-N Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Dialog Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. DKO diselenggarakan sesuai fokus materi pembahasan dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan utama yang meliputi :

a. Persiapan DKO

- Menyusun Laporan Capaian Kinerja (LCK);
- Mengidentifikasi fokus tema dan menyusun Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK);
- Mendistribusikan KADK dan menyediakan bahan dialog;

b. Pelaksanaan DKO

- Overview Capaian Kinerja;
- Reviu Kinerja Tematik;
- Menetapkan Rencana Aksi;
- Penilaian efektivitas DKO;

c. Tindak Lanjut

- Menyusun dan mengomunikasikan rencana aksi;
- Melaksanakan rencana aksi dan menyusun laporan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala. IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 90 (skala 100), polarisasi *maximize*), tingkat kendali *high*, dan tingkat validitas *proxy*.

Dalam melaksanakan DKO, unsur penilaian efektivitas DKO adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran pimpinan unit (10%)
- b. Surat undangan (10%)
- c. Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (15%)
- d. Absensi peserta rapat (5%)
- e. Lembar Capaian Kinerja (LCK) (20%)
- f. Risalah rapat (15%)
- g. Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)
- h. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (10%)

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dihitung sebagai berikut:

$$(50\% \times \text{Pelaksanaan DKO}) + (50\% \times (\text{Jumlah arahan yang telah ditindaklanjuti} / \text{Jumlah arahan}))$$

LAPORAN KINERJA 2019

Hasil penghitungan Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2019, capaiannya adalah sebesar 99,17% sehingga berdasarkan indeks capaian kinerjanya adalah sebesar 110,18% (hijau).

Tercapainya target kinerja persentase efektivitas pelaksanaan DKO pada tahun 2019 didukung oleh faktor-faktor berikut:

- Pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin setiap bulannya.
- Administrasi DKO yang selalu dibuat oleh Seksi Kepatuhan Internal dan rekomendasi hasil rapat selalu disampaikan kepada unit terkait.

Kemudian hal-hal yang mengurai nilai IKU efektifitas pelaksanaan DKO adalah adanya kegiatan yang harus dihadiri oleh Pemimpin unit kerja sehingga berhalangan menghadiri DKO.

SS-12 PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Capaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun 2019 sebesar 101,55% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

12b-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.1/2019 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Indikator dan bobot setiap indikator dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang diukur adalah diatur sebagai berikut:

Realisasi IKU = {(70% x komponen hasil) + (30% x komponen proses)} /				
Bobot yang diperhitungkan sebagaimana tabel bobot				
No.	Komponen Pengukuran			Bobot
Komponen Hasil				
1.	Capaian Keluaran	x	30%	70%
2.	Efisiensi	x	15%	
3.	Konsistensi	x	10%	
4.	Penyerapan anggaran atas pagu netto	x	15%	
Komponen Proses				
5.	Penyelesaian tagihan	x	4%	30%
6.	Penyemapaian data kontrak	x	3%	
7.	Pengelolaan UP	x	4%	
8.	Perencanaan Kas	x	2%	
9.	Penyampaian LPJ	x	2%	
10.	Pengembalian SPM	x	3%	
11.	Retur SP2D	x	3%	
12.	Revisi DIPA	x	5%	
13.	Pagu Minus	x	2%	
14.	Dispensasi SPM	x	2%	

Penjelasan dan ketentuan atas Indikator dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

a. Capaian Keluaran

Terbagi menjadi 2, yaitu Capaian Keluaran Program yang diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran Kegiatan dengan target indikator Keluaran Program, dan Capaian Keluaran Kegiatan yang diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran Kegiatan dengan target indikator Keluaran Kegiatan.

b. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan Capaian Keluaran Program pada tingkat eselon I atau Capaian Keluaran Kegiatan pada tingkat eselon II/satuan kerja. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran Program atau capaian Keluaran Kegiatan.

c. Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto

Merupakan realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk *self-blocking*, Hasil Efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (Efisiensi IMK) dan dana lainnya yang penggunaannya bersifat khusus (dana khusus) berdasarkan kebijakan alokasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu anggaran yang bersifat kontinjensi yang pengeluarannya secara penuh ditentukan oleh pihak di luar organisasi/satker.

d. Konsistensi

Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal sesuai dengan Lembar Ketiga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau RPD setelah revisi RPD pertama dengan sebanyak-banyaknya adalah 1 kali per triwulan dan tidak dapat diakumulasikan pada triwulan berikutnya.

e. Revisi DIPA

Revisi DIPA dilaksanakan dengan mengukur kualitas perencanaan anggaran oleh K/L dengan menghitung revisi DIPA, terhadap jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Sater (hanya untuk revisi yang bersifat pergeseran dalam hal pagu tetap. Revisi RPD tanpa perubahan *digital stamp* tidak termasuk dalam perhitungan revisi DIPA.

f. Penyelesaian Tagihan

Dilaksanakan dengan mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai yang bersifat kontraktual. Semakin tinggi ketepatan waktu penyelesaian tagihan, semakin baik nilai kinerjanya.

g. Pengelolaan Uang Persediaan (UP)

KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP sesuai PMK nomor 190/PMK.05/2012. Mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu pengajuan SPM-GUP (*revolving* UP), dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP. Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian GUP, semakin baik nilai kinerjanya.

h. Penyampaian Data Kontrak

Mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyampaian data kontrak ke KPPN. Dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian data kontrak, semakin baik nilai kinerjanya.

i. Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)

Mengukur rasio kesalahan akibat gagal validasi SPM di KPPN antara lain disebabkan terdapat perbedaan pada nama pemilik rekening antara *supplier* yang udah terdaftar dengan ADK SPM, salah dalam mengisikan tanggal SPM (tanggal SPM melampaui tanggal saat pengajuan SPM), Bagan Akun Standar (BAS) pada SPM tidak sama dengan BAS pada Kontrak. Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L, semakin rendah rasio jumlah SPM salah, semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada Satker atau K/L.

j. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan rasio retur terhadap seluruh SP2D yang diterbitkan. Retur SP2D terjadi karena adanya ketidaksesuaian identitas *supplier* pada SP2D dengan data nasabah di bank. Semakin rendah rasio retur SP2D, semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada Satker atau K/L.

k. Perencanaan Kas (Renkas)

Dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN. Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian Renkas, semakin baik nilai kinerjanya. Berdasarkan PMK nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, satker berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Penarikan Dana harian ke KPPN untuk perkiraan transaksi signifikan dengan minimal nilai tertentu serta jadwal penyampaian tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Transaksi	Nilai SPM	Penyampaian RPD Harian	Periode Pemutakhiran
Transaksi A	Lebih dari Rp1 Triliun	15 hari kerja sebelum pengajuan SPM	10 hari kerja sebelum pengajuan SPM
Transaksi B	Antara Rp500 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun	10 hari kerja sebelum pengajuan SPM	5 hari kerja sebelum pengajuan SPM
Transaksi C	Rp1 Miliar sampai dengan Rp500 Miliar	5 hari kerja sebelum pengajuan SPM	-

l. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

Berdasarkan PMK nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan PMK nomor 230/PMK.05/2016 bahwa Satker wajib menyampaikan LPJ pada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Mengukur tingkat kepatuhan Bendahara dalam menyampaikan LPJ ke KPPN secara tepat waktu. Semakin tinggi rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ, semakin baik nilai kinerjanya.

m. Nilai Pagu Minus Belanja K/L

Mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L berdasarkan rasio pagu minus belanja di akhir tahun anggaran terhadap total pagu belanja K/L. Dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.

n. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Menilai kinerja yang terkait dengan pemenuhan norma/batas waktu pengajuan SPM di akhir tahun. Dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

LAPORAN KINERJA 2019

Capaian IKU Kualitas pelaksanaan anggaran bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Bulan Desember 2019

Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	Bobot	Bobot Konversi	Capaian
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)x(c)
Capaian Keluaran (SMART DJA)	101,90%	30%	30%	30,57%
Efisiensi (modifikasi on SMART DJA)	95,07%	15%	15%	14,26%
Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto (Based IMK 346/2017)	96,46%	15%	15%	14,47%
Konsistensi (modifikasi on SMART DJA dan IKPA)	90,35%	10%	10%	9,04%
Penyelesaian Tagihan (based IKPA)	96,67%	4%	4%	3,87%
Data Kontrak (based IKPA)	100,00%	3%	3%	3,00%
Pengelolaan UP (based IKPA)	100,00%	4%	4%	4,00%
Perencanaan Kas (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
Penyampaian LPJ (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
Pengembalian SPM (based IKPA)	95,00%	3%	3%	2,85%
Retur SP2D (based IKPA)	99,50%	3%	3%	2,99%
Revisi DIPA (based IKPA)	100,00%	5%	5%	5,00%
Pagu Minus (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
Dispensasi SPM (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
Realisasi IKU				98,04%
Bobot Konversi				100,00%
Realisasi IKU Triwulan (setelah konversi)				98,04%

Tabel 3.22
Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Q1	Q2	s.d Q2	Q3	s.d Q3	Q4	s.d Q4
	92,73%	98,49%	95,61%	96,65%	95,96%	98,04%	96,48%
Target	95%		95%		95%		95%
Capaian IKU	97,61%		100,64%		101,01%		101,55%

Berdasarkan penghitungan diatas, capaian kualitas pelaksanaan anggaran KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2019 adalah 96,48% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Indeks capaian IKU adalah 101,55% (hijau).

C. REALISASI ANGGARAN

✓ DIPA KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas digunakan untuk melaksanakan program dengan nama “Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dengan nama kegiatan “Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah”. Kode satker KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah 411620.

Realisasi Anggaran Belanja DIPA Tahun Anggaran 2019 di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Realisasi Belanja KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp. 22.887.798.219 atau mencapai 96,05% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 23.830.153.000. Capaian tersebut diperoleh dari capaian masing-masing jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 3.23
Realisasi Belanja Total Tahun 2019

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	% Realisasi
Belanja Pegawai	13.805.753.000	13.701.338.947	104.414.053	99.24%
Belanja Barang	10.024.400.000	9.186.459.272	837.940.728	91.64%
TOTAL	23.830.153.000	22.887.798.219	942.354.781	96.05%

Tabel 3.24
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019

MAK	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	% Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	9.092.693.000	9.087.559.820	5.133.180	99.94%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	206.000	150.267	55.733	72.94%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	644.244.000	642.242.640	2.001.360	99.68%
Belanja Tunj. Anak PNS	180.025.000	179.624.460	400.540	99.77%
Belanja Tunj. Struktural PNS	253.100.000	251.640.000	1.460.000	99.42%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	141.720.000	141.180.000	540.000	99.61%
Belanja Tunj. PPh PNS	6.977.000	5.851.100	1.125.900	83.86%
Belanja Tunj. Beras PNS	509.144.000	508.605.660	538.340	99.89%
Belanja Uang Makan PNS	1.853.280.000	1.803.791.000	49.489.000	97.32%
Belanja Tunjangan Umum PNS	422.720.000	421.795.000	925.000	99.78%
Belanja Uang Lembur	701.644.000	658.899.000	42.745.000	93.90%
TOTAL	13.805.753.000	13.701.338.947	104.414.053	99.24%

Tabel 3.25
Realisasi Belanja Barang Tahun 2019

MAK	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	% Realisasi
Belanja Bahan	119.000.000	118.231.580	768.420	99.35%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	304.212.000	179.687.990	124.524.010	59.06%
Belanja Jasa Profesi	1.768.000	1.750.000	18.000	98.98%
Belanja Jasa Lainnya	37.000.000	37.000.000	0	100%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	747.759.000	721.526.951	26.232.049	96.49%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	198.000.000	187.220.000	10.780.000	94.55%
Belanja Sewa	598.700.000	587.649.520	11.050.480	98.15%
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	24.696.000	24.075.000	621.000	97.48%
Belanja Keperluan Perkantoran	1.372.147.000	1.362.483.791	9.663.209	99.29%
Belanja Barang Operasional Lainnya	374.378.000	351.432.150	22.945.850	93.87%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	503.088.000	502.470.620	617.380	99.87%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	96.000.000	81.685.496	14.314.504	85.08%
Belanja Langganan Listrik	48.000.000	42.388.407	5.611.593	88.30%
Belanja Langganan Telepon	27.600.000	20.594.069	7.005.931	74.61%
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung	762.729.000	757.611.970	5.117.030	99.32%
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung	112.000.000	111.933.015	66.985	99.94%
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.248.939.000	3.653.322.713	595.616.287	85.98%
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	27.500.000	26.706.500	793.500	97.11%
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	167.200.000	166.121.600	1.078.400	99.35%
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	154.200.000	154.200.000	0	100%
Belanja Barang Persediaan Lainnya	99.484.000	98.367.900	1.116.100	98.87%
TOTAL	10.024.400.000	9.186.459.272	837.940.728	91.64%

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain pengukuran capaian kinerja yang terukur dalam Peta Strategis KPPBC TMP Tanjung Emas yang dituangkan melalui IKU, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019, sebagai berikut:

1. Penghargaan yang diterima selama tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) pegawai yang mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan a.n. Sdr. Yoan Pratama, NIP 199312202013101001. Adapun rincian penghargaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas nomor KEP-448/WBC.10/KPP.MP.01/2019 tentang Pemberian Penghargaan Kategori Pengabdian Kerja Baik.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-268/BC/2019 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi di Lingkungan DJBC 2019.
- c. Penghargaan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Keuangan 2019 dari Menteri Keuangan.

2. Inovasi selama 2019

Pada tahun 2019, KPPBC TMP Tanjung Emas telah membuat inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

- d. Aplikasi SI ATAPP
SI ATAPP merupakan akronim dari Sistem Aplikasi Tempat Penimbunan Pabean yaitu sistem aplikasi berbasis web/internet yang bermanfaat sebagai media pelayanan kepabeanan dan cukai terhadap Barang yang Dinyataan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, Barang yang Menjadi Milik Negara dan Tegahan P2
- e. Aplikasi SIGEMES
Sistem aplikasi berbasis web/internet yang berfungsi untuk menghubungkan data antara seksi administrasi Manifes dengan seksi PKC IV terutama petugas Gate Pelabuhan dalam rangka pengeluaran barang dalam jenis muatan Full Container Load (FCL) maupun Less Container Load (LCL).
- f. Aplikasi E-LITE
Sistem aplikasi berbasis web/internet yang berfungsi untuk merekam data para pengguna jasa yang membutuhkan layanan informasi/konsultasi.
- g. Aplikasi WISE
Merupakan saluran yang digunakan dalam melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas yang dilakukan antar pegawai dan tidak perlu mengungkapkan identitas pelapor.

h. Aplikasi SEMBRANI

Merupakan sistem aplikasi berbasis web/internet yang bermanfaat sebagai media pelayanan kepabeanan dan cukaiterhadap barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut di terminal kedatangan dan keberangkatan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani.

3. Capaian *Dwelling Time* di Pelabuhan Tanjung Emas

Salah satu porgram pemerintah dalam rangka mendorong industri dan meningkatkan investasi adalah memperbaiki sistem logistik nasional, yang salah satunya diukur dengan performa *dwelling time* di bidang impor yang telah diamanatkan oleh Menteri Keuangan untuk Tanjung Emas agar diperbaiki capaian *Dwelling Time* (DT) pelabuhan kurang dari 4 (empat) hari atau bahkan kurang dari 3 (tiga) hari.

Capaian DT di Pelabuhan Tanjung Emas dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 walaupun trennya membaik akan tetapi capaiannya selalu di atas angka 4 (empat) hari. Pada bulan November 2019 perhitungan *dwelling time* terjadi penurunan dan tercapai 3.90 hari. hal tersebut disebabkan tren dokumen sedikit menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada Bulan Desember 2019 mengalami kenaikan kembali dikarenakan adanya hari libur dan cuti bersama. Berikut adalah capaian DT di Pelabuhan Tanjung Emas mulai Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Tabel 3.25
Data Capaian *Dwelling Time* di Pelabuhan Tanjung Emas Tahun 2019

PERIODE	PRE	CC	POST	DT
Januari 2019	3.59	0.47	2.07	6.14
Februari 2019	3.03	0.57	1.82	5.42
Maret 2019	2.29	0.23	1.73	4.25
April 2019	2.58	0.54	1.94	5.06
Mei 2019	2.61	0.58	2.16	5.23
Juni 2019	2.60	0.38	1.72	4.71
Juli 2019	2.17	0.31	1.89	4.37
Agustus 2019	2.49	0.49	1.64	4.62
September 2019	2.13	0.37	1.72	4.22
Oktober 2019	2.28	0.32	1.56	4.15
November 2019	2.07	0.34	1.49	3.90
Desember 2019	2.11	0.39	1.61	4.11

Dalam rangka perbaikan capaian DT telah dilakukan beberapa upaya, baik internal maupun eksternal. Perbaikan internal difokuskan pada perbaikan tahapan customs clearance yang dinilai cukup berhasil ditandai dengan capaian angka customs clearance di bawah 0,5 hari. Perbaikan eksternal dilakukan melalui bersinergi dengan pihak importir, pengurus barang (PPJK), TPKS, KSOP, GINSI, ALFI, dll melalui kegiatan berbagai kegiatan yang kedepannya perlu ditingkatkan.

4. Monitoring dan Evaluasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi

Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Penertiban Impor Beresiko Tinggi yang dilakukan setiap minggu sejak akhir bulan Juli 2019. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PIBT tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Nota Dinas Rahasia Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor NDR-35/IJ.3/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Hasil Monitoring Pelaksanaan Program PIBT dan Uji Coba Implementasi SKPJ pada KPPBC TMP Tanjung Emas dan Nota Dinas Rahasia Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Nomor ND-119/WBC.10/2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Monitoring Pelaksanaan Program PIBT dan Uji Coba Implementasi SKPJ pada KPPBC TMP Tanjung Emas. Peserta Monev PIBT antara lain Bidang P2, Bidang KI, Bidang Kepabean dan Cukai, dan Seksi P2, Seksi KI, Seksi PKC Impor, dan PFPD.

5. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

KPPBC TMP Tanjung Emas mulai melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai tindak lanjut dari sub aksi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di kawasan strategis pelabuhan laut dan bandar udara. Pada bulan Mei tahun 2019 telah dilaksanakan penancangan dan internalisasi ZI menuju WBK/WBBM oleh Kepala Kantor bersama instansi terkait dan seluruh pejabat/pegawai. Untuk melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, KPPBC TMP Tanjung Emas telah membentuk Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dari pejabat dan pegawai yang diberikan tugas yang dapat dibagi menjadi 6 bidang, yaitu Bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Pelayanan Publik. Penilaian telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Tingkat Kementerian dan Tim Penilai Tingkat Nasional. KPPBC TMP Tanjung Emas lolos pada penilaian tingkat kementerian namun belum berhasil pada penilaian tingkat nasional.

Selain pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan internal kantor, KPPBC TMP Tanjung Emas juga berperan aktif dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Pencanaan ZI menuju WBK/WBBM Kawasan Pelabuhan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2019 oleh unit kerja yang berada di wilayah pelabuhan. Unit tersebut terdiri dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Kantor Distrik Navigasi Kelas II Tanjung Emas, Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Tengah, Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Selain itu juga KPP Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Stasiun Meteorologi Tanjung Emas Semarang, Kantor Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang, Pos Cabang Kejaksaan Tinggi Pelabuhan Tanjung Emas, PT Pelindo III (Persero) Regional Jawa Tengah, serta PT Pelindo Daya Sejahtera.



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab III, dapat disimpulkan bahwa 15 (lima belas) dari 16 (enam belas) indikator kinerja organisasi tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan, sehingga nilai kinerja organisasi (NKO) KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2019 sebesar 112,16% (hijau).

Indikator kinerja yang mencapai target dan berstatus "hijau" adalah sebagai berikut:

1. Waktu penyelesaian proses kepabeanan (120%)
2. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai (101,79%).
3. Indeks kepuasan pengguna jasa (105,46%).
4. Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan (110,35%).
5. Persentase kepatuhan importir (116,43%).
6. Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai (116,84%).
7. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (116,58%).
8. Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai (101,10%).
9. Persentase efektivitas patroli laut (116,43%).
10. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional (120%).
11. Persentase Efektifitas Implementasi Manajemen Resiko (120%).
12. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal (117,64%).
13. Persentase peningkatan kompetensi pegawai (120%)
14. Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (110,19%)
15. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (101,56%)

Indikator kinerja pada tahun 2019 yang tidak ada capaian dan berstatus ("Abu-abu") adalah IKU "Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)".

Untuk meningkatkan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas serta mempertahankan capaian yang sudah dicapai pada tahun 2019 perlu dirumuskan langkah-langkah perbaikan. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah langkah untuk perbaikan kinerja penerimaan bea dan cukai terhadap target.

Realisasi penerimaan pada tahun 2019 adalah sebesar 101,79% dari target yang ditetapkan. Penerimaan Bea Masuk tahun 2019 lebih rendah dari penerimaan Bea Masuk tahun 2018. Hal ini disebabkan karena masuknya beberapa komoditas ke dalam Pusat Logistik Berikat (PLB) yaitu Besi Baja, Ban, dan MMEA yang mengakibatkan adanya penurunan potensi penerimaan dari sektor bea masuk, meningkatnya penggunaan FTA serta penurunan penerimaan BM dari Importasi atas Garmen.

LAPORAN KINERJA 2019

Peningkatan penggunaan tarif preferensi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA). Tarif preferensi secara umum lebih rendah dari tarif normal, sehingga akan mengurangi pendapatan dari segi bea masuk. Untuk menghadapi hal tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas akan meningkatkan pemahaman Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) terhadap pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan tarif preferensi, sehingga tarif preferensi hanya akan diberikan terhadap impor yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain langkah tersebut, langkah lain untuk optimalisasi penerimaan di tahun mendatang adalah peningkatan fungsi penetapan nilai pabean. Langkah-langkah tersebut diharapkan akan dapat menambah penerimaan di bidang impor yang meliputi penerimaan bea masuk, sanksi administrasi berupa denda, PPN Impor, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun Anggaran 2019 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Umpan balik dari seluruh pihak atas informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja/ Kontrak Kinerja Tahun 2019
- Lampiran II : Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019
- Lampiran III : Nilai Kinerja Organisasi 2019
- Lampiran IV : Surat Keputusan, Piagam, Surat Tugas dan Link Berita terkait Penghargaan
- Lampiran V : Lampiran Penjelasan Masing-masing Inovasi



KONTRAK KINERJA
NOMOR: 6/BC.21/2019
KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019

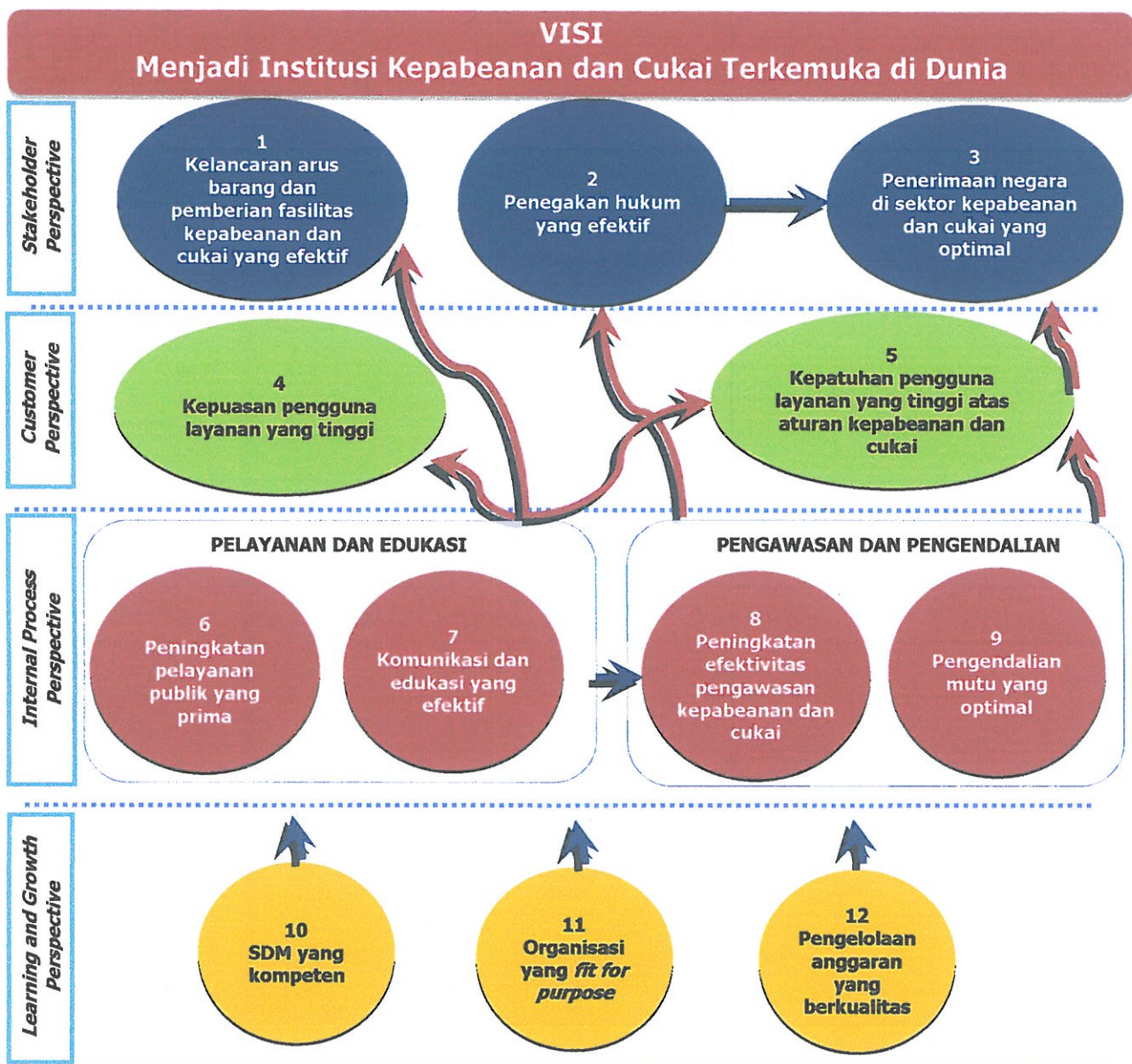


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2019
1	Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang efektif	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	1,10 hari
2	Penegakan hukum yang efektif	2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%
3	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,03 (skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,30%
		5b-CP	Persentase kepatuhan importir	80%
6	Peningkatan pelayanan publik yang prima	6a-CP	Rata-rata persentase janji layanan kepabeanan dan cukai	100%
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai	8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%
		8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%
		9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2019
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Kegiatan

Pembinaan Penyelenggaraan
Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Anggaran

Rp 22.089.715.000,00

Kepala Kantor Wilayah DJBC
Jawa Tengah dan DIY,



Parjiya
NIP 19660521 198810 1 002

Semarang, Januari 2019
Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas,



Tjertja Karja Adil
NIP 19701124 199012 1 001

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019**

[illegible]

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanaan dan cukai							
8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai	50%	60%	60%	70%	70%	92%	92%
8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	70%	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal							
9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	76%	76%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	40%	55%	55%	70%	70%	85%	85%
9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	15%	20%	20%	40%	40%	75%	75%
10	SDM yang kompeten							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
11a-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	54%	66%	66%	78%	78%	90%	90%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Semarang, Januari 2019
PNS yang dinilai,



Tjertja Karja Adil
NIP 19701124 199012 1 1 001

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KPPBC TMP TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab

Semarang, Januari 2019
PNS yang dinilai,



Tjertja Karja Adil
NIP 19701124 199012 1 1 001

Sasaran Kerja Pegawai

I. PEJABAT PENILAI			II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
No			No		
1	Nama	Parjiya	1	Nama	Tjertja Karja Adil
2	NIP	19660521 198810 1 002	2	NIP	19701124 199012 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda / IV/c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tingkat I / IV/b
4	Jabatan	Kepala Kantor	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	5	Unit Kerja	KPPBC TMP Tanjung Emas

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET 2019			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Memenuhi konversi waktu penyelesaian proses kepabeanan	-	1,10 hari	100	12 bulan	-
2	Menyelesaikan penyidikan sampai tahap dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	-	70%	100	12 bulan	-
3	Mencapai target penerimaan bea dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
4	Memenuhi kepuasan pengguna jasa	-	4,03 (skala 5)	100	12 bulan	-
5	Menyelesaikan piutang bea dan cukai	-	90,30%	100	12 bulan	-
6	Meningkatkan kepatuhan atas aturan kepabeanan dan cukai	-	80%	100	12 bulan	-
7	Memenuhi janji layanan kepabeanan dan cukai	-	100%	100	12 bulan	-
8	Menyelenggarakan komunikasi dan edukasi yang efektif	-	80 (skala 100)	100	12 bulan	-
9	Menindaklanjuti temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	-	92%	100	12 bulan	-
10	Melaksanakan patroli laut yang efektif	-	70%	100	12 bulan	-
11	Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	-	76%	100	12 bulan	-
12	Melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	85%	100	12 bulan	-
13	Mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif	-	75%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	70%	100	12 bulan	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET 2019			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
15	Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang efektif	-	90%	100	12 bulan	-
16	Mencapai penyerapan anggaran dan output belanja	-	95%	100	12 bulan	Rp 10,02 M

Pejabat Penilai,



Parjiya
NIP 19660521 198810 1 002

Semarang, Januari 2019
PNS yang dinilai,



Tjertja Karja Adil
NIP 19701124 199012 1 001

Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019

No	No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective					110.90%
SS-1		Kelancaran arus barang dan pemberian fasilitas kepabeanaan dan cukai yang efektif			120%
1	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	1,1 hari *)	0,71 hari	120%
SS-2		Penegakan hukum yang efektif			N/A
2	2a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	70%	N/A	N/A
SS-3		Penerimaan negara di sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal			101.79%
3	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100% **)	101,79%	101.79%
Customer Perspective					101.75%
SS-4		Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			105.46%
4	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,03 (skala 5)	4,25	105.46%
SS-5		Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanaan dan cukai			113.39%
5	5a-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	99,65%	110.35%
6	5b-CP	Persentase kepatuhan importir	80%	93,14%	116.43%
Internal Process Perspective					115.51%
SS-6		Peningkatan pelayanan publik yang prima			116.84%
7	6a-CP	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai	100%	116,84%	116.84%
SS-7		Komunikasi dan edukasi yang efektif			116.58%
8	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	93,26	116.58%
SS-8		Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanaan dan cukai			108.77%
9	8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai	92%	93,01%	101.10%
10	8b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	70%	81,5%	116.43%
SS-9		Pengendalian mutu yang optimal			119.21%
11	9a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%	95,83%	120%
12	9b-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	98,81%	120%
13	9c-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	90%	99,99%	117.64%

No	No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Learning and Growth Perspective					110.58%
SS-10		SDM yang kompeten			120%
14	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	93,83%	120%
SS-11		Organisasi yang <i>fit for purpose</i>			110.19%
15	11a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%	99,17%	110.19%
SS-12		Pengelolaan anggaran yang berkualitas			101.56%
16	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	96,48%	101.56%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					112.16%

*) Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan mulai bulan November 2017 sesuai Surat Direktur Kepatuhan Internal nomor : S-493/BC.08/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Perubahan Manual IKU, manual IKU untuk perhitungan waktu penyelesaian proses kepabeanaan diubah. Waktu penyelesaian untuk PIB yang mendapat jalur merah dikalikan 0,75 karena terdapat proses dalam jalur merah yang menjadi tanggung jawab dari pengguna jasa.

**) Realisasi sesuai target APBN-P

Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas

[illegible]

Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas

[illegible]

Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas

[illegible]

CAPAIAN KINERJA PEGAWAI
TAHUN 2019
Tjertja Karja Adil
Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas

SASARAN STRATEGIS		IDENTITAS IKU								CAPAIAN IKU						M a x	KETERANGAN
		NO	KODE IKU	Jenis Cascading	NAMA IKU	POLARISASI	VALIDITAS	DOC	BOBOT IKU	BOBOT TERTIMBANG	TARGET	REALISASI	SATUAN	INDEKS CAPAIAN	WARNA		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE														110.58%	Hijau	30%	
SDM yang kompeten		14	10a-N	N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Maximize	Proxy	Moderate	14%	100.00%	70%	93.83%	Persentase	120.00%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
120.00%	Hijau																
Organisasi yang fit for purpose		15	11a-N	N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	Maximize	Proxy	Moderate	14%	100.00%	90%	99.17%	Persentase	110.19%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
110.19%	Hijau																
Pengelolaan anggaran yang berkualitas		16	12a-N	N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Maximize	Proxy	Moderate	14%	100.00%	95%	96.4775%	Persentase	101.56%	Hijau	–	
Nilai	Warna																
101.56%	Hijau																
														112.16%	Hijau	0.2772375 0.166119216 0.346532868 0.331744152	

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

NOMOR : KEP-448/WBC.10/KPP.MP.01/2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KATEGORI PENGABDIAN KERJA BAIK KEPADA PEGAWAI
DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS PERIODE TAHUN 2018

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap negara, maka Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan pengabdian kerja baik dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Unit Vertikal KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada tanggal 17 Juli 2019, pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini telah menunjukkan pengabdian kerja baik dalam pelaksanaan tugasnya sehingga patut diberikan penghargaan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tentang pemberian penghargaan kategori pengabdian kerja baik kepada pegawai yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853);
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-55/BC/2010 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KATEGORI PENGABDIAN KERJA BAIK DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS PERIODE TAHUN 2018

PERTAMA...

- PERTAMA : Memberikan penghargaan kategori Pengabdian Kerja Baik periode Tahun 2018 kepada pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini karena sikap, perilaku, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas selalu menunjukkan kerajinan, ketaatan, kedisiplinan, kejujuran, sikap responsif terhadap segala penugasan, dan bertanggung jawab atas penyelesaian tugas dengan baik dan tepat waktu.
- KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Kepatuhan Internal;
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta

Petikan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2019
KEPALA KANTOR,

ttd.

TJERTJA KARJA ADIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Umum



Irena R. Rahmawati
NIP. 197004241996032001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

Nomor : KEP-448/WBC.10/KPP.MP.01/2019

Tanggal : 29 Juli 2019

DAFTAR PEGAWAI YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN
KATEGORI PENGABDIAN KERJA BAIK
DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
PERIODE TAHUN 2018

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	Jabatan	Unit Kerja
1.	Yoan Pratama 199312202013101001	Pengatur Muda Tk.I / II/b	Pelaksana Pemeriksa	Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen
2.	Indri Rahmawati 198703162009122007	Penata Muda / III/a	Pelaksana Pemeriksa	Seksi Perbendaharaan
3.	Ahmad Rinaldi 199005142014111001	Pengatur Tk.I / II/d	Pelaksana Pemeriksa	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2019
KEPALA KANTOR,

ttd.

TJERTJA KARJA ADIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Umum



Inna Rachmawati
NIP 197004241996032001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

PIAGAM PENGHARGAAN

KATEGORI PENGABDIAN KERJA KLASIFIKASI BAIK

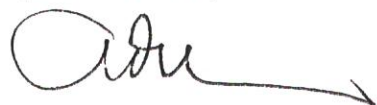
Diberikan kepada:

Nama : Yoan Pratama
NIP : 199312202013101001
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I / II/b
Unit Kerja : Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Karena sikap, perilaku, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas pada umumnya menunjukkan kerajinan, ketaatan, kedisiplinan, kejujuran, sikap responsif terhadap segala penugasan, dan bertanggung jawab atas penyelesaian tugas dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor KEP-448/WBC.10/KPP.MP.01/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pemberian Penghargaan Kategori Pengabdian Kerja Baik Kepada Pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Periode Tahun 2018.

Semarang, 29 Juli 2019
Kepala Kantor,



Tjertja Karja Adil
NIP 197011241990121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



PIAGAM PENGHARGAAN
PEGAWAI BERPRESTASI DJBC 2019

DIBERIKAN KEPADA:

YOAN PRATAMA
NIP 199312202013101001

Karena telah menunjukkan prestasi kerja yang sangat baik dalam pelaksanaan tugasnya.

BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR :
KEP -268 /BC/2019 TANGGAL 1 OKTOBER 2019

Direktur Jenderal,

Heru Pambudi
NIP 19700211 198912 1 001





KURS PAJAK MINGGU INI

13/01/2020 Pilih

KMK Nomor 1/MK.10/2020
Tanggal Berlaku: 08 Januari 2020
- 14 Januari 2020

1 USD	13,914.00
1 AUD	9,718.93
1 CAD	10,712.97
1 DKK	2,083.05
1 HKD	1,787.35
1 MYR	3,396.31

LAYANAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

Ruang Layanan Informasi Lt. 1
Gedung KPPBC TMP Tanjung Emas

☎ : (024) 76631968
✉ : pli.temas@gmail.com
📱 : @beacukaiemas
📱 : @beacukaiemas

LAYANAN PENGADUAN

Ruang Pengaduan Lt.2 Gedung
KPPBC TMP Tanjung Emas
Kotak Pengaduan : Lt. 1 Gedung
KPPBC TMP Tanjung Emas
☎ : (024) 76631970
✉ : 083838900031
✉ : kibctemas@yahoo.com

Klik Disini

FACEBOOK



Be the first of your friends to like this

TWITTER

Tweets by @beacukaiemas

Bea Cukai Tanjung Emas Retweeted

#UangKita @KemenkeuRI

Replying to @KemenkeuRI
Ini yang paling penting#UangKita kan tujuannya menyejahterakan masyarakat, apa saja bentuk kesejahteraan yang dicapai?

Tahun ini, kesempatan kerja membaik, tingkat kemiskinan menurun, lalu ketimpangan sosial pun berkurang.



Embed View on Twitter

RAIH PENGHARGAAN DARI MENTERI KEUANGAN MELALUI APLIKASI MANDIRI

30 October 2019



Semarang (04/10/2019) – Yoan Pratama, pegawai Bea Cukai Tanjung Emas mendapatkan penghargaan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani berkat inisiatif yang tinggi dalam pembuatan aplikasi mandiri di beberapa kantor Bea Cukai.



Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada saat peringatan Hari Oeang ke-73, sekaligus Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Banteng Kemenkeu, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil memberikan apresiasi yang tinggi kepada pegawai yang bertugas pada Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) tersebut, karena atas inisiasinya dapat mempermudah pelayanan kepada pengguna jasa.



"Kalau Ibu Menteri punya quotes jangan pernah lelah menciptakan negeri ini, mari kita juga jangan lelah untuk menjadikan Bea Cukai Tanjung Emas makin baik", ungkap Tjertja Karja Adil pada saat Apel Rutin Bulan November. Tjertja juga berpesan agar seluruh pegawai menjadikan prestasi ini sebagai inspirasi untuk selalu menciptakan ide-ide kreatif sebagai bentuk SDM Unggul menuju Indonesia Maju.

SHARE THIS PAGE

Twitter

BERITA TERAKHIR

Pisah Sambut Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas

Edukasi Hukum Kepabeanan dan Cukai kepada Mahasiswa Unwahas

Kunjungan Pertama Polimarin Semarang, Tularkan Ilmu Selamanya

Tutup Akhir Tahun dengan Raih Indeks SKPJ 4.25, Bea Cukai Apresiasi Pengguna Jasa.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan, Lindungi Industri Tekstil Dalam Negeri

POJOK MEDIA

Penyederhanaan Izin Kepabeanan Dorong Ekspor

Mahasiswa STAN mengenal lebih dekat Pelabuhan Tanjung Emas

Bea Cukai dukung kebijakan pemerintah lakukan penyesuaian tarif pajak

Bea Cukai Tanjung Emas terus tekan "dwelling time"

Bea Cukai Tanjung Emas bangun branding lewat sosial media

MODUL PEB VER 6.0.8

MODUL PIB VER 6.12

Tracking Barang Kiriman

INFO LARTAS



STATS



Period: Last 7 Days

Sessions: 10,196

generated by GADWP

PERATURAN TERAKHIR

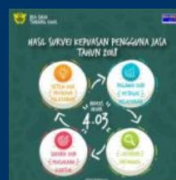
IMPOR BARANG KIRIMAN 3 USD – PMK 199/PMK.010/2019 – Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

PER-09/BC/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

INSTAGRAM



PROFIL



Hasil Survei Kepuasan

INSPIRASI

"Dunia berkembang dengan pesat, masyarakat selalu berubah, maka jadilah Bea Cukai Masa Kini"

Tjertja Karja Adil, Kepala KPPBC Tanjung Emas





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 19 - 20, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021)3812727,
FAKSIMILE (021)3812727, SITUS WWW.KEMENKEU.GO.ID

SURAT TUGAS
NOMOR ST-964/SJ.5/2019

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan seleksi dan penganugerahan penghargaan pegawai berprestasi dan penghargaan pegawai teladan di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2019, bersama ini kami menugasi pejabat/pegawai sebagaimana terlampir untuk dapat melaksanakan tugas dimaksud sesuai dengan jadwal terlampir.

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan kegiatan di atas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 25 Oktober 2019
Kepala Biro Sumber Daya Manusia



Ditandatangani secara elektronik
Humaniati

Tembusan:

1. Pejabat Pembuat Komitmen
2. Pejabat/Pegawai yang bersangkutan
3. Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan



Lampiran Surat Tugas
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Nomor: ST- /SJ.5/2019
Tanggal Oktober 2019

Pegawai Berprestasi dan Pegawai Teladan Kementerian Keuangan Tahun 2019

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan	Unit	Jadwal	Keterangan
1.	Sri Mirani 198308072009012008	III/c	Kepala Subbagian Regulasi SDM pada Biro Sumber Daya Manusia	SETJEN	Senin, 28 Oktober 2019 dan Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
2.	Kandha Aditya Sandjoyo 198911022010121003	III/a	Pelaksana pada Direktorat Penyusunan APBN	DJA	Senin, 28 Oktober 2019 dan Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
3.	Joko Galungan 197307261994031001	III/d	Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada KPP Wajib Pajak Besar Dua	DJP	Senin, 28 Oktober 2019 dan Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
4.	Raqaimul Hakiki Tasran 199404112015021003	II/b	Pelaksana pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta	DJBC	Senin, 28 Oktober 2019 dan Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
5.	Umar Jati 198004092001121001	III/c	Kepala Seksi Dukungan Teknis dan Pengendalian Mutu Aplikasi pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan	DJPb	Senin, 28 Oktober 2019 dan Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
6.	Gunawan Kurnia Satriadi 198706282009121002	III/a	Pelaksana pada KPKNL Pekalongan	DJKN	Minggu, 27 Oktober 2019 s.d. Kamis, 31 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
7.	Imam Sumardjoko 197901132000121003	III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah	DJPK	Senin, 28 Oktober 2019 dan Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
8.	Dea Avega Editya 198904162009121003	III/a	Pelaksana pada Direktorat Surat Utang Negara	DJPPR	Senin, 28 Oktober 2019 dan Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
9.	Mochamad Gilang Ramadhan 198506012006021002	III/d	Auditor Muda pada Inspektorat VII	ITJEN	Senin, 28 Oktober 2019 dan Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi



No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan	Unit	Jadwal	Keterangan
10.	Andi Yoga Trihartanto 199004032008121001	II/c	Pelaksana pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro	BKF	Senin, 28 Oktober 2019 dan Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
11.	Junaedi Purnomo 197406121996021001	IV/b	Widyaiswara Madya pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	BPPK	Minggu, 27 Oktober 2019 s.d. Kamis, 31 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
12.	Adrianto 198402252009011005	III/c	Kepala Subbagian Organisasi II B pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	SETJEN	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
13.	Endang Puspita Dewi 199102182013102001	II/d	Pelaksana pada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	SETJEN	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
14.	Irpan Heryana 198310202010121002	III/c	Pelaksana pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan	SETJEN	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
15.	Rachman Sukri 197109031992011001	IV/a	Kepala Subbagian Otomasi Proses Bisnis pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan	SETJEN	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
16.	Cahyanto Hutomo 197305151999031001	IV/a	Kepala Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran BUN I pada Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	DJA	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
17.	Ririn Aprilia 198204102002122001	III/c	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak	DJA	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
18.	Lambang Adiatma 197605151996021001	IV/a	Penilai PBB Madya pada Kanwil DJP Jakarta Utara	DJP	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
19.	Mulyana Rustiawan 198308222003121002	III/a	Account Representative pada KPP Jakarta Tanah Abang Tiga	DJP	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
20.	Sudianto 198307282002121002	II/d	Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	DJBC	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
21.	Yoan Pratama 199312202013101001	II/b	Pelaksana pada KPPBC TMP Tanjung Emas	DJBC	Selasa, 29 Oktober 2019 s.d. Kamis, 31 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
22.	Slamet Darmawan 198410232007101001	III/b	Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	DJPb	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
23.	Lutfi Hakim 199005192012101002	III/a	Pelaksana pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan	DJPb	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
24.	M. Miftahul Huda Noor 199109012013101003	II/d	Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	DJKN	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
25.	Siti Indah Susilowati 199503142016122002	II/c	Pelaksana pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	DJKN	Selasa, 29 Oktober 2019 s.d. Kamis, 31 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan	Unit	Jadwal	Keterangan
26.	Megan Nandia 199505232016122001	II/c	Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	DJPPR	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
27.	Amy Pramanda 198707292008122004	III/b	Auditor Pertama pada Inspektorat VI	ITJEN	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
28.	Hermulia Hadie Putra 199101252012101003	III/b	Auditor Pertama pada Inspektorat III	ITJEN	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
29.	Agung Yuniarto 197107031992031002	IV/b	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	BPPK	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Berprestasi
30.	Tantan Sapta Aji 197707171998031002	III/c	Pelaksana pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan	SETJEN	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Teladan
31.	Anggun Wibowo 198308032004121005	III/c	Kepala Subbagian Pengendalian Kode Etik dan Manajemen Risiko pada Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran	DJA	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Teladan
32.	Abdul Rahman 198710112010121006	III/c	Pelaksana pada Kanwil DJP Riau	DJP	Selasa, 29 Oktober 2019 s.d. Kamis, 31 Oktober 2019	Pegawai Teladan
33.	Rizaldhi Putra 199712042018011001	II/a	Pelaksana pada KPPBC TMP C Manado	DJBC	Selasa, 29 Oktober 2019 s.d. Kamis, 31 Oktober 2019	Pegawai Teladan
34.	Muchammad Syafar 198311152003121004	III/a	Pelaksana pada KPPN Mamuju	DJPb	Selasa, 29 Oktober 2019 s.d. Kamis, 31 Oktober 2019	Pegawai Teladan
35.	Akhmad Mabaron 198202252004121001	III/b	Penilai Tk. I pada KPKNL Sidoarjo	DJKN	Selasa, 29 Oktober 2019 s.d. Kamis, 31 Oktober 2019	Pegawai Teladan
36.	Ahmad Bilal Mawardi 198404022006021004	III/b	Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	DJPK	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Teladan
37.	Rahmanul Yusuf Mugiharto 198512102010121004	III/c	Pelaksana pada Direktorat Surat Utang Negara	DJPPR	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Teladan
38.	Tri Juli Astuti Sihombing 199007032010122001	III/b	Auditor Pertama pada Inspektorat II	ITJEN	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Teladan
39.	Qoriah Qurani Aenul Yakin 198901072015022001	III/b	Pelaksana pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	BKF	Rabu, 30 Oktober 2019	Pegawai Teladan
40.	Novan Herdiyanto 198511092007101001	III/b	Pelaksana pada Balai Diklat Malang	BPPK	Selasa, 29 Oktober 2019 s.d. Kamis, 31 Oktober 2019	Pegawai Teladan



APLIKASI E-LITE

Inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik di KPPBC TMP TANJUNG EMAS



1. E-LITE

Judul Inovasi			E-LITE
Waktu mulai penerapan inovasi			07 Januari 2019
Ringkasan Singkat (Summary)			Sistem aplikasi berbasis web/internet yang berfungsi untuk merekam data para pengguna jasa yang membutuhkan layanan informasi/konsultasi.
A	Analisis Masalah	1. Apakah masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi ini?	Pelayanan terhadap pengguna jasa dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan pembuatan laporan setiap bulan menjadi terhambat.
B	Pendekatan Strategis	2. Siapa saja yang mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut?	Pembuatan aplikasi diusulkan oleh Seksi PLI dan dibantu Seksi PDAD
		3. Dalam hal apa inovasi ini kreatif dan inovatif?	Aplikasi ini memiliki keunggulan dalam perekaman yang cepat dan terdokumentasi dengan baik.
C	Pelaksanaan dan Penerapan	4. Bagaimana pelaksanaan inovasi?	Aplikasi dijalankan dengan konsisten setiap jam kerja.
		5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?	Seksi PLI sebagai pengguna aplikasi dan Seksi PDAD sebagai pemantau kinerja aplikasi.
		6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?	Aplikasi ini menggunakan web/internet yang disambungkan ke komputer kantor.
		7. Apa saja keluaran (<i>output</i>) yang paling berhasil dari pelaksanaan inovasi?	• Formulir Layanan Informasi dihasilkan dengan cepat, sehingga pengguna jasa cepat dilayani. • Data base pengguna jasa akurat.
		8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?	Aplikasi dipantau dan dievaluasi oleh atasan langsung pengguna aplikasi. Jika terdapat pembaharuan, atasan langsung akan berkoordinasi dengan seksi PDAD
		9. Apa kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut diatasi?	Tidak terdapat kendala
D	Dampak Sebelum dan Sesudah Inovasi	10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini?	- Memiliki data base pengguna jasa yang akurat. - Penyelesaian permasalahan yang dimiliki pengguna jasa dapat diatasi dengan cepat. - Apabila konsultasi memerlukan koordinasi, Formulir Layanan Informasi

			akan diteruskan ke seksi terkait.
		11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi?	Sebelum ada inovasi : - Perekaman data secara manual. - Aplikasi sering error dan lambat. - Formulir layanan informasi sering berbeda format. - Rekapitulasi dalam pelaporan bulanan dilakukan secara manual. - Koordinasi dilakukan secara manual. Setelah ada inovasi : - Sistem data base akurat - Aplikasi digunakan cepat. - Koordinasi dengan seksi lain dilakukan melalui aplikasi. - Pelaporan laporan bulanan menjadi lebih cepat.
E	Keberlanjutan	12. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan direplikasi?	Ya, aplikasi ini berkelanjutan dengan menambahkan fitur-fitur dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi lainnya di masa mendatang.
		13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?	Pelayanan terhadap pengguna jasa menjadi lebih mudah dan data base yang dimiliki akurat.

E-LITE

Layanan Informasi

YOAN PRATAMA

Konsultasi

Inbox

Laporan

Selamat Datang di

Aplikasi OFFICE AUTOMATION

REKAM

Nama/Perusahaan/Keperluan/No Agenda

CARI

NO AGENDA	TANGGAL	NAMA	PERUSAHAAN	IDENTITAS	SARANA	KEPERLUAN	DITERUSKAN	STATUS	DETAIL	CETAK
001151/WBC.10 /KPPMP/0114/2019	10-05-2019	PUJI	PT. TRANSPORTAMA	PPJK	DATANG LANGSUNG	INSTALL PDE INTERNET IMPOR	SEKSI PDAD	TERKIRIM	DETAIL	
001150/WBC.10 /KPPMP/0114/2019	10-05-2019	IWAN	PT. LAUTAN ARTHA MAS	PPJK	DATANG LANGSUNG	ERROR PDE INTERNET IMPOR	SEKSI PDAD	TERKIRIM	DETAIL	
001149/WBC.10 /KPPMP/0114/2019	10-05-2019	SYAHRUL DEKA PRATAMA	UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SEMARANG	LAIN - LAIN	DATANG LANGSUNG	KONSULTASI MAGANG MAHASISWA JURUSAN STATISTIKA	SUBBAGGIAN UMUM	TERKIRIM	DETAIL	
001148/WBC.10 /KPPMP/0114/2019	10-05-2019	AGUS	CV. WISDOM ILAHI	IMPORTIR	DATANG LANGSUNG	RESPON INP TIDAK SAMPAI PADA MODUL PDE INTERNET IMPOR PENGGUNA JASA (SUDAH DIKIRIM ULANG)	SEKSI PDAD	TERKIRIM	DETAIL	
001147/WBC.10 /KPPMP/0114/2019	10-05-2019	RAMA	PT. SINAR TIRTA EMAS	PPJK	DATANG LANGSUNG	KONFIRMASI PERUBAHAN DATA PIB	SEKSI PDAD	TERKIRIM	DETAIL	
001146/WBC.10 /KPPMP/0114/2019	10-05-2019	ADE PARLISMANA	DEVIAN BACHTI KARSA	PPJK	DATANG LANGSUNG	KONSULTASI INSTAL MODUL PEB	SEKSI PDAD	TERKIRIM	DETAIL	

E-LITE

Layanan Informasi

Konsultasi

Inbox

Laporan

Selamat Datang di

Aplikasi OFFICE AUTOMATION

NO AGENDA	TANGGAL	NAMA	PERUSAHAAN	IDENTITAS	SARANA	KEPERLUAN	ACTION
001217/WBC.10 /KPPMP/0114/2019	20-05-2019	JESSICA AGUSTINA	-	LAIN - LAIN	TELEPON	PENGADUAN TERKAIT BARANG KIRIMAN TKG YANG HILANG	JAWAB
001054/WBC.10 /KPPMP/0114/2019	16-04-2019	GATOT	PT KARYA RENCANA	PPJK	DATANG LANGSUNG	KONSULTASI RESPON "NOTA PERBITAHAN JAMINAN" PIB, SUDAH KE PERBENDAHWAAN, JAMINAN SUDAH SESUAL, TIDAK ADA MASALAH, DISARAKAN MENGHUBUNGI PDAD	JAWAB

DATA 1 - 2 DARI 2



APLIKASI SEMBRANI

Inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik di KPPBC TMP TANJUNG EMAS



1. SEMBRANI (SISTEM MANDIRI BANDARA AHMAD YANI)

Judul Inovasi			SEMBRANI (Sistem Mandiri Bandara Ahmad Yani)
Waktu mulai penerapan inovasi			08 Januari 2019
Ringkasan Singkat (<i>Summary</i>)			Merupakan sistem aplikasi berbasis <i>web</i> /internet yang bermanfaat sebagai media pelayanan kepabeanan dan cukai terhadap barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut di terminal kedatangan dan keberangkatan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani.
A	Analisis Masalah	1. Apakah masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi ini?	Sebelum penerapan Sistem Mandiri Bandara Ahmad Yani (SEMBRANI), pelayanan pembeaan baik CD bayar, PIBK, SPSA, Impor Sementara, Persetujuan Penangguhan Pengeluaran dan ATA Carnet belum terintegasi dalam satu sistem, dan masih menggunakan aplikasi excel untuk database dimana masih tersimpan di komputer sehingga apabila ada kerusakan terhadap komputer akan dapat menghilangkan database yang ada.
B	Pendekatan Strategis	2. Siapa saja yang mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut?	Yang mengusulkan Seksi PKC 1 dengan berkoordinasi dengan Seksi PDAD KPPBC TMP Tanjung Emas dan Setelah penggunaan aplikasi SEMBRANI diharapkan semua pelayanan penumpang di terminal keberangkatan dan kedatangan internasional sudah dalam satu sistem aplikasi dan database sudah langsung tersimpan pada server, sehingga apabila komputer mengalami kendala, database masih aman.
		3. Dalam hal apa inovasi ini kreatif dan inovatif?	Aplikasi SEMBRANI sudah berbasis online, sehingga bisa di akses oleh beberapa petugas dengan menggunakan beberapa komputer yang ada di kantor terminal kedatangan penumpang, sehingga jika melayani beberapa penumpang dapat diselesaikan dengan cepat.
C	Pelaksanaan dan Penerapan	4. Bagaimana pelaksanaan inovasi?	Bahwa inovasi SEMBRANI ini masih ada sistem yang perlu diperbaiki, contohnya adanya formulir SPPB PIBK dan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) untuk impor sementara yang belum ada di dalam aplikasi tersebut.
		5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?	Seksi PKC I (Bandara) selaku operasional (user) dan Seksi PDAD selaku tim pemeliharaan.
		6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk	SDM pada seksi PKC I selaku pengguna / operasional aplikasi, dan Sarana berupa

		inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?	Server dan pemeliharaan dari seksi PDAD.
		7. Apa saja keluaran (<i>output</i>) yang paling berhasil dari pelaksanaan inovasi?	1. Formulir dapat langsung dicetak dengan mengisi form yang telah tersedia di aplikasi. 2. Kecepatan dalam pelayanan baik pembeaan dan fasilitas lainnya kepada penumpang.
		8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?	Melakukan sistem Monitoring dan Evaluasi kecepatan waktu layanan secara periodik, sebagai implikasi penerapan Aplikasi SEMBRANI ini.
		9. Apa kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut diatasi?	Apabila ditemukan kendala yakni server down atau jaringan internet tidak normal, sehingga cara mengatasinya dengan komunikasi langsung dan bantuan dari tim PDAD.
D	Dampak Sebelum dan Sesudah Inovasi	10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini?	Kecepatan waktu layanan terhadap penumpang dan database yang sudah tersimpan baik di server kantor.
		11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi?	Sebelumnya aplikasi offline / menggunakan format manual (bentuk excel), sedangkan SEMBRANI sudah online dengan akses internet dan data base dapat disimpan dalam server.
E	Keberlanjutan	12. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan direplikasi?	Aplikasi ini akan terus berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku namun tidak direplikasi.
		13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?	Bahwa dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi SEMBRANI sangat memudahkan petugas dalam melakukan pelayanan kepada penumpang baik dari aspek pembeaan maupun fasilitas lain di terminal kedatangan dan keberangkatan internasional.

SEMBRANI

me Admin

Admin /

Pengumuman

Browse Pengumuman

Form Pengumuman

Home

Pengumuman

E-Library

Profile

Referensi

SBU

PKC

PDAD

Browse Pengumuman

Q

Show 10 entries

No	Judul	Isi	Waktu	Aksi
No data available in table				

Showing 0 to 0 of 0 entries

PreviousNext

SEMBRANI © 2015-2019 KPPBC TMP Tanjung Emas | Developed by PDAD Squad

Versi 5.0



APLIKASI SI ATAPP

Inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik di KPPBC TMP TANJUNG EMAS



1. SI ATAPP (SISTEM APLIKASI TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN)

Judul Inovasi			SI ATAPP (Sistem Aplikasi Tempat Penimbunan Pabean)
Waktu mulai penerapan inovasi			7 Januari 2019
Ringkasan Singkat (<i>Summary</i>)			SI ATAPP merupakan akronim dari Sistem Aplikasi Tempat Penimbunan Pabean yaitu sistem aplikasi berbasis web/internet yang bermanfaat sebagai media pelayanan kepabeanan dan cukai terhadap Barang yang Dinyataan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, Barang yang Menjadi Milik Negara dan Tegahan P2.
A	Analisis Masalah	1. Apakah masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi ini?	a. Data stok inventaris Barang hanya dapat dicek dengan berkas excel yang notabene hanya dapat di akses di kantor. b. Monitoring kegiatan bersifat setempat karena pencatatannya di buku Agenda di masing-masing TPP/TPPS. c. Tidak terdapat foto barang. d. Untuk mengetahui stok barang terkini sangat tergantung dari laporan bulanan dari balai lelang, sehingga sulit dilakukan pengecekan sewaktu-waktu. e. Pencarian status barang (BTD,BDN,BMN dan/atau Tegahan P2) berbelit karena berkas excel yang berbeda.
B	Pendekatan Strategis	2. Siapa saja yang mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut?	Berawal dari ide Kepala Seksi PKC IV yang ingin dapat mengetahui/melihat stok inventaris barang yang tersimpan di seluruh TPP/TPPS secara realtime, sehingga dibuat lah SI ATAPP yang dalam implementasinya sangat memudahkan petugas Bea dan Cukai untuk memonitoring data inventaris barang di seluruh TPP/TPPS secara <i>realtime</i> dan dapat diakses kapan pun dan dimana pun karena bersifat online.
		3. Dalam hal apa inovasi ini kreatif dan inovatif?	SI ATAPP memberikan sebuah kemudahan dan cara baru dalam pekerjaan di Seksi PKC khususnya dalam pengelolaan barang BTD, BDN, BMN, dan tegahan P2.
C	Pelaksanaan dan Penerapan	4. Bagaimana pelaksanaan inovasi?	Pelaksanaan berjalan dengan lancar dan baik selama tidak terdapat kendala yang berarti seperti kendala pada server.
		5. Siapa saja pemangku kepentingan yang	a. Bea Cukai b. TPPS

		terlibat dalam pelaksanaan?	
		6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?	a. Manusia b. Internet c. Server d. Perangkat Komputer e. Gawai Setiap sumber daya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dari sebuah pekerjaan.
		7. Apa saja keluaran (<i>output</i>) yang paling berhasil dari pelaksanaan inovasi?	Terdapatnya laporan/data barang secara cepat, mudah, dan terbaru. Dengan adanya aplikasi ini, pencarian data barang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dimanapun melalui gawai.
		8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?	Sistem PDCA a. Plan (Rencanakan) Dari sebelum dibuatnya Aplikasi ini, telah dilakukan perencanaan yang baik dan matang. b. Do (Kerjakan) Rencana yang matang tersebut dieksekusi dengan dibangunnya SI ATAPP, dan dibarengi pelaksanaan penggunaannya oleh pegawai. c. Check (Cek) Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil yang telah didapatkan dari penggunaan SI ATAPP secara berkala. d. Act (Tindak Lanjut) Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi untuk membuat perbaikan yang diperlukan.
		9. Apa kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut diatasi?	Kendala utama dari penggunaan SI ATAPP ialah Server, jika terdapat permasalahan pada server, aplikasi tidak dapat digunakan. Kendala tersebut dapat teratasi dengan adanya koordinasi yang baik dengan Seksi PDAD sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan SI ATAPP.
D	Dampak Sebelum dan Sesudah Inovasi	10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini?	Terdapatnya laporan/data barang secara cepat, mudah, dan terbaru. Dengan adanya aplikasi ini, pencarian data barang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dimanapun melalui gawai.
		11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi?	Kondisi sebelum penggunaan SI ATAPP : a. Data stok inventaris Barang hanya dapat dicek dengan berkas excel yang notabene hanya dapat di akses di

			kantor b. Monitoring kegiatan bersifat setempat karena pencatatannya di buku Agenda di masing-masing TPP/TPPS c. Tidak terdapat foto barang d. Untuk mengetahui stok barang terkini sangat tergantung dari laporan bulanan dari balai lelang, sehingga sulit dilakukan pengecekan sewaktu-waktu e. Pencarian status barang (BTD,BDN,BMN dan/atau Tegahan P2) berbelit karena berkas excel yang berbeda Manfaat setelah penggunaan SI ATAPP : a. Dapat melihat data stok barang secara realtime dan dimana pun - Contoh : Pengguna jasa (PPJK/Importir) dapat menanyakan keberadaan barang kepada petugas di lapangan tanpa harus ke kantor b. Monitoring kegiatan tercatat secara online c. Terdapat foto barang d. Pencarian status barang lebih mudah e. Mempermudah dalam menyandingkan data barang antara Bea Cukai dengan balai lelang (saling <i>crosscheck</i>) f. Dapat mengetahui informasi detail barang dengan scan barcode* - *Scan barcode dengan aplikasi tambahan g. Laporan dapat didownload dengan format excel
E	Keberlanjutan	12. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan direplikasi?	Iya
		13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?	Pemanfaatan internet dan sumber daya yang ada secara maksimal dapat membantu dan mempermudah pekerjaan.

LAPORAN STOCK

Tanggal

Jenis

Lokasi

DATE: 17-05-2019

NO.	LOKASI	BARCODE	SPPB		BC 1.1			NOMOR CONTAINER	SIZE	TGL MASUK TPPS	EKS KAPAL
			NO.	TANGGAL	NO.	POS	TANGGAL				
1	ARTHA	0052/WBC.10 /KPPMP01/TPP03 /LCL/2019	SPPB-029/WBC.09 /KPPMP01/2008	15-09-2008	-	-	15-08-2008	-		17-09-2008	GA-232 16-7-2016
2	ARTHA	0053/WBC.10 /KPPMP01/TPP03 /LCL/2019	SPPB-066/WBC.09 /KPPMP01/2009	15-01-2009	604	62	07-10-2008	MSKU1202315		19-01-2009	MV EVER APEX V.274S
3	ARTHA	0056/WBC.10 /KPPMP01/TPP03	SPPB-066/WBC.09 /KPPMP01/2009	15-01-2009	0144	017	05-03-2008	WHLU5242420		19-01-2009	MV. WANHAI 215 VS284



APLIKASI SIGEMES

Inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik di KPPBC TMP TANJUNG EMAS



1. SIGEMES (SISTEM GATE MANIFES)

Judul Inovasi			SIGEMES (Sitem Gate Manifes)
Waktu mulai penerapan inovasi			01 Januari 2019
Ringkasan Singkat (<i>Summary</i>)			Sistem aplikasi berbasis web/internet yang berfungsi untuk menghubungkan data antara seksi administrasi Manifes dengan seksi PKC IV terutama petugas Gate Pelabuhan dalam rangka pengeluaran barang dalam jenis muatan <i>Full Container Load (FCL)</i> maupun <i>Less Container Load (LCL)</i> .
A	Analisis Masalah	1. Apakah masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi ini?	Waktu Pengeluaran Container cukup lama dan terdapat antrian yang cukup panjang, terdapat double pekerjaan (Input Nomor BCP, Nomor <i>Container</i> , dan Jenis Muatan) yang dilakukan oleh seksi Administrasi Manifes dan PKC IV (Gate)
		2. Siapa saja yang mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut?	Seksi Administrasi Manifes, PKC IV (Gate) dan PDAD
B	Pendekatan Strategis	3. Dalam hal apa inovasi ini kreatif dan inovatif?	Mempermudah Seksi PKC IV (gate) dalam melakukan pengecekan dan pengeluaran <i>container</i> dari Pelabuhan.
		4. Bagaimana pelaksanaan inovasi?	Seksi Administrasi Manifes melakukan pengecekan atas BC 1.1 dan BC 2.3 yang di ajukan oleh PPJK dengan data manifest yang telah diinput, apabila sudah sesuai dilakukan input Nomor BCP, Jenis Muatan dan Nomor <i>Container</i> melalui aplikasi SIGEMES. Seksi PKC IV melakukan pengecekan nomor BCP pada Aplikasi SIGEMES sebagai dasar pengeluaran <i>Container</i> dari Pelabuhan.
C	Pelaksanaan dan Penerapan	5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?	Seksi Administrasi Manifes, PKC IV (Gate) dan PDAD
		6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?	Jaringan Internet
		7. Apa saja keluaran (<i>output</i>) yang paling berhasil dari pelaksanaan inovasi?	Waktu yang dibutuhkan oleh PKC IV (Gate) untuk mengeluarkan container menjadi lebih cepat dan tidak ada double input.

		8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?	Pemeliharaan dan Pengecekan rutin oleh seksi PDAD
		9. Apa kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut diatasi?	Tidak ada
D	Dampak Sebelum dan Sesudah Inovasi	10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini?	- Mempersingkat waktu pengeluaran container. - Sudah tidak double pekerjaan
		11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi?	Waktu pengeluaran <i>container</i> sebelumnya membutuhkan waktu yang lebih lama karena petugas gate perlu melakukan <i>input</i> nomor BCP, Nomor Container, Jenis Muatan dan pengecekan ulang nomor container dengan dokumen BC 2.3. Setelah penerapan inovasi waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat.
E	Keberlanjutan	12. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan direplikasi?	Ya
		13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?	Melakukan pekerjaan seefektif mungkin diperlukan dalam menunjang pelayanan.

PRINT SCREEN SIGEMES



SIGEMES

Sistem Gate-Manifes

Rekam

Browse

Gate

Laporan

Laporan Gate

YOAN PRATAMA

Selamat Datang di

Aplikasi SIGEMES

REKAM

No BCP / No BC 2.3

CARI

No BCP	Tgl BCP	Kantor Pengawas	No BC2.3	Tgl BC2.3	Perusahaan	Jumlah Barang	Status	Kontainer	Action
15066	2019-05-10	KPPBC TMP A Surakarta	21710	2019-05-10	GLOBALINDO INTIMATES	43 CARTON	FCL	Tambah	Copy Ubah
15065	2019-05-10	KPPBC TMP A Semarang	38447	2019-05-10	PUNGKOOK INDONESIA ONE	16 PACKAGE	LCL	Tambah	Copy Ubah
15064	2019-05-10	KPPBC TMP A Semarang	38331	2019-05-10	HONG FA INTERNATIONAL	175 BALE	FCL	Tambah	Copy Ubah
15063	2019-05-10	KPPBC TMP A Semarang	38296	2019-05-10	ARA SHOES INDONESIA	132 PACKAGE	FCL	Tambah	Copy Ubah



SIGEMES

Sistem Gate-Manifes

Rekam

Browse

Gate

Laporan

Laporan Gate

BYANABILLA

Selamat Datang di

Aplikasi SIGEMES

No BCP / No BC 2.3

CARI

No BCP	Tgl BCP	Kantor Pengawas	No BC2.3	Tgl BC2.3	Perusahaan	Jumlah Barang	Status	Action
15572	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	42499	2019-05-23	GRAND BEST INDONESIA	21 ROLL	LCL	Detail
15571	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	42508	2019-05-23	GRAND BEST INDONESIA	59 ROLL	LCL	Detail
15570	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	42573	2019-05-23	SEMARANG GARMENT	15 CARTON	LCL	Detail
15569	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	42552	2019-05-23	SIDEN SEMARANG ASIA	12 CARTON	LCL	Detail
15568	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	42548	2019-05-23	SIDEN SEMARANG ASIA	36 ROLL	LCL	Detail
15567	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	42549	2019-05-23	STARLIGHT GARMENT SEMARANG	538 ROLL	FCL	Detail
15566	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	425515	2019-05-23	SIDEN SEMARANG ASIA	137 ROLL	LCL	Detail
15565	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	42564	2019-05-23	DAE YOUNG TEXTILE	172 PACKAGE	FCL	Detail
15564	2019-05-23	KPPBC TMP B Yogyakarta	5051	2019-05-23	BUSANAREMAJA AGRACIPTA	1 BALE	LCL	Detail
15563	2019-05-23	KPPBC TMP B Yogyakarta	5052	2019-05-23	BUSANAREMAJA AGRACIPTA	14 CARTON	LCL	Detail
15562	2019-05-23	KPPBC TMP B Yogyakarta	5054	2019-05-23	BUSANAREMAJA AGRACIPTA	8 BALE	LCL	Detail
15561	2019-05-23	KPPBC TMP A Surakarta	24034	2019-05-23	SUNWOOD GARMENT INDONESIA	25 PACKAGE	LCL	Detail
15560	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	41949	2019-05-21	AST INDONESIA	8 PACKAGE	LCL	Detail
15559	2019-05-23	KPPBC TMP A Surakarta	23960	2019-05-23	JJ GLOVES INDO	25 BALE	LCL	Detail
15558	2019-05-23	KPPBC TMP A Surakarta	24048	2019-05-23	PAN BROTHERS TBK	8 CARTON	LCL	Detail
15557	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	42547	2019-05-23	LUCKY TEXTILE SEMARANG	32 PACKAGE	LCL	Detail
15556	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	42555	2019-05-23	FUKURYO INDONESIA	31 CARTON	FCL	Detail
15555	2019-05-23	KPPBC TMP A Surakarta	23371	2019-05-26	CARTIN LINGERIE INDONESIA	1729 PACKAGE	FCL	Detail
15554	2019-05-23	KPPBC TMP A Semarang	42400	2019-05-23	RIOTEX GARMINDO	14 CARTON	LCL	Detail
15553	2019-05-23	KPPBC TMP A Surakarta	23818	2019-05-22	DEWI SAKUDRA KUSUMA	31 ROLL	LCL	Detail

Data 1 - 20 dari 15571



SIGEMES

Sistem Gate-Manifes

Rekam

Browse

Gate

Laporan

Laporan Gate

BYANABILLA

Selamat Datang di

Aplikasi SIGEMES

No BCP / No Kontainer

CARI

No BCP	Tanggal	Perusahaan	Status	No Kontainer	Waktu Keluar	Status
15587	2019-05-23	STARLIGHT GARMENT SEMARANG	FCL	CAU9697161		BELLAR KELLAR Detail
15586	2019-05-23	DAE YOUNG TEXTILE	FCL	HDM04774798		BELLAR KELLAR Detail
15585	2019-05-23	FUKURYO INDONESIA	FCL	8FU2757460		BELLAR KELLAR Detail
15584	2019-05-23	CARTIN LINGERIE INDONESIA	FCL	BEAU4465792		BELLAR KELLAR Detail
15583	2019-05-23	CARTIN LINGERIE INDONESIA	FCL	GAOR0308636		BELLAR KELLAR Detail
15582	2019-05-23	YOUNG JIN SPORT INDONESIA	FCL	FCU7225077		BELLAR KELLAR Detail
15581	2019-05-23	SARI WAYNA ASLI TEXTILE INDUSTRY	FCL	DOU0228665		BELLAR KELLAR Detail
15580	2019-05-23	SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA	FCL	FBL09116863		BELLAR KELLAR Detail
15579	2019-05-23	SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA	FCL	YOM05190402		BELLAR KELLAR Detail
15578	2019-05-23	UNDARAN SARI GARMENTS	FCL	EMC01296345	2019-05-23 15:09:59	KELLAR Detail
15577	2019-05-23	SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA	FCL	EGH09187993		BELLAR KELLAR Detail
15576	2019-05-23	SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA	FCL	EGH03486205		BELLAR KELLAR Detail
15575	2019-05-23	PRIMA SEJATI BELAJTERA	FCL	NYG04974419		BELLAR KELLAR Detail
15574	2019-05-23	PRIMA SEJATI BELAJTERA	FCL	BRU03099222		BELLAR KELLAR Detail
15573	2019-05-23	PRIMA SEJATI BELAJTERA	FCL	BRU03099222		BELLAR KELLAR Detail
15572	2019-05-23	PRIMA SEJATI BELAJTERA	FCL	BRU03099222		BELLAR KELLAR Detail
15571	2019-05-23	DIARUM	FCL	BEU04603063		BELLAR KELLAR Detail
15570	2019-05-23	DIARUM	FCL	CCU06797668		BELLAR KELLAR Detail
15569	2019-05-23	PRIMA SEJATI BELAJTERA	FCL	BRU03099222		BELLAR KELLAR Detail
15568	2019-05-23	KANAKAN GLOBAL INDONESIA	FCL	VNL0637798		BELLAR KELLAR Detail

Data 1 - 20 dari 15568

SIGEMES
Sistem Gate Manifest

PFANABELLA

Rekam

Browse

Date

Laporan

Laporan Date

Sistem Daring di

Aplikasi SIGEMES

BCP

DAFTAR BCP

TANGGAL AIRAL

TANGGAL AKHIR

PROSES

RESET

4

3

Created © 2018 by PDAD Temas

SIGEMES
Sistem Gate Manifest

PFANABELLA

Rekam

Browse

Date

Laporan

Laporan Date

Sistem Daring di

Aplikasi SIGEMES

BONTAMEN

FCL

LCL

DAFTAR

DAFTAR KONTAINER BERDASARKAN BONTAMEN BCP

TANGGAL AIRAL

TANGGAL AKHIR

PROSES

RESET

DAFTAR KONTAINER BERDASARKAN BONTAMEN KELLAR

TANGGAL AIRAL

TANGGAL AKHIR

PROSES

RESET

4

3

Created © 2018 by PDAD Temas



APLIKASI WISE

Inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik di KPPBC TMP TANJUNG EMAS



1. WISE (Whistleblowing System)

Judul Inovasi			WISE (Whistleblowing System)
Waktu mulai penerapan inovasi			31 Desember 2018
Ringkasan Singkat (Summary)			Merupakan saluran yang digunakan dalam melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas yang dilakukan antar pegawai dan tidak perlu mengungkap identitas pelapor.
A	Analisis Masalah	1. Apakah masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi ini?	Belum adanya saluran internal yang dapat diakses dengan mudah dalam melaporkan suatu perbuatan yang diindikasikan sebagai suatu pelanggaran.
B	Pendekatan Strategis	2. Siapa saja yang mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut?	Diusulkan oleh Seksi Kepatuhan Internal
		3. Dalam hal apa inovasi ini kreatif dan inovatif?	Karakteristik aplikasi ini, nama pengadu dapat dirahasiakan dengan baik.
C	Pelaksanaan dan Penerapan	4. Bagaimana pelaksanaan inovasi?	Saluran ini masih terus dikembangkan guna memperbaiki fitur agar pelaksanaannya semakin baik
		5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?	Seksi Kepatuhan Internal
		6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?	Saluran WISE ini berbasis web dan dapat diakses oleh siapapun.
		7. Apa saja keluaran (output) yang paling berhasil dari pelaksanaan inovasi?	Pengaduan dapat terekam dengan baik, dan nama pengadu dapat dirahasiakan.
		8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?	Sistem Pemantauan oleh petugas PDAD
		9. Apa kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut diatasi?	Tidak terdapat kendala
D	Dampak Sebelum dan Sesudah	10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan	Pengaduan dapat terekam dengan baik, dan

	Inovasi	inovasi ini?	nama pengadu dapat dirahasiakan.
		11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi?	Kerahasiaan dari pelapor lebih terjamin, karena sebelumnya pelapor harus datang langsung/ menggunakan telepon ketika melapor.
E	Keberlanjutan	12. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan direplikasi?	Sistem WISE terus dikembangkan untuk memaksimalkan pelayanan
		13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?	Selalu memperbaiki kekurangan demi mencapai kesempurnaan pelayanan

PRINT SCREEN

WISE BC Tanjung Emas

Selamat datang di Whistleblowing System
KPPBC TMP Tanjung Emas

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Kementerian Keuangan akan MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai whistleblower. KPPBC TMP Tanjung Emas menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.

Buat Laporan

Unsur Pengaduan

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

What: Perbuatan berindikasi pelanggaran

Kerahasiaan Pelapor

Kementerian Keuangan akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena Kementerian Keuangan hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.

Agar Kerahasiaan lebih terjaga, perhatikan hal-hal berikut ini:

Lika ingin identitas Anda tetap rahasia, jangan memberitahukan/mengicikan data-data

WISE BC Tanjung Emas

Pelaporan

Nama Anda

Nama Anda

Email Anda

Alamat Email

No Telepon

Nomor Telepon

Perihal

Perihal

Lokasi

Lokasi Kejadian

Tanggal Kejadian

Tanggal Kejadian

Uraian

Uraian Kejadian

Lapor

Batal



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas